



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen Arsip;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan, mempunyai nilai arsip.
6. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.
7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi Kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH
Penata / IIIc
NIP. 197501082003121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember
2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. UMUM

1. Klasifikasi Kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan Kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

145

100 : Pokok Masalah tentang PEMERINTAHAN

140 : Sub Masalah tentang PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

145 :Sub Masalah tentang ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN

4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitas dan substansi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah

000 UMUM

010 URUSAN DALAM

020 PERALATAN

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI

050 PERENCANAAN

060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN

080 KONFRENSI

090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAH PUSAT

120 PEMERINTAH PROVINSI

130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

140 PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD

160 DPRD

PROVINSI

170 DPRD KABUPATEN / KOTA

180 HUKUM

190 HUBUNGAN LUARNEGERI

200 POLITIK

210 KEPARTAIAN

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

230 ORGANISASI PROFESIDAN FUNGSIONAL

240 ORGANISASI PEMUDA

250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN

260 ORGANISASI WANITA

270 PEMILIHAN UMUM

280 KOMISI PEMILIHAN UMUM

300 KEAMANAN / KETERTIBAN

310 PERTAHANAN

320 KEMILITERAN

330 KEAMANAN

340 PERTAHANAN SIPIL

350 KEJAHATAN

360 BENCANA

370 KECELAKAAN / SAR

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

410 PEMBANGUNAN DESA

420 PENDIDIKAN

426 KEOLAHRAGAAN

427 KEPEMUDAAN

430 KEBUDAYAAN

440 KESEHATAN

450 AGAMA

460 SOSIAL

470 KEPENDUDUKAN

472 PENCATATAN SIPIL

474.6 TRANSMIGRASI

479 KELUARGA BERENCANA

480 MEDIA MASSA

490 INFORMASI KOMUNIKASI

500 PEREKONOMIAN

510 PERDAGANGAN

520 PERTANIAN

522 KEHUTANAN

523 PERIKANAN DAN KELAUTAN

524 PETERNAKAN

525 PERKEBUNAN

526 KETAHANAN PANGAN

527 PENYULUHAN

530 PERINDUSTRIAN

540 PERTAMBANGAN / KESAMUDERAAN

550 PERHUBUNGAN

554 POS

555 TEKNOLOGI INFORMASI

556 PARIWISATA DAN REKREASI

557 METEOROLOGI

560 TENAGA KERJA

570 PERMODALAN

580 PERBANKAN MONETER

590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN

620 JALAN

630 JEMBATAN

640 BANGUNAN

650 TATA KOTA

660 TATA LINGKUNGAN

670 KETENAGAAN

680 PERALATAN

690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN

720 BIDANG POLITIK

730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN

740 BIDANG KESRA

750 BIDANG PEREKONOMIAN

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

770 PENGAWASAN PEJABATPUBLIK

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN

820 MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 KEPENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN

920 OTORISASI / SKO

930 VERIFIKASI

940 PEMBUKUAN

950 PERBENDAHARAAN

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

970 PENDAPATAN

980 KEUANGAN PENDIDIKAN PEGAWAI

990 BENDAHARAWAN

B. RINCIAN

KLASIFIKASI ARSIP

000 UMUM

000 UMUM

001 Lambang

- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Departemen
- .4 Provinsi
- .5 Kabupaten/Kota
- .6 Lembaga Pemerintah Non Departemen

002 Tanda Kehormatan/Penghargaan

- .1 Bintang
- .2 Satya Lencana
- .3 Parasamya Purna Karya Nugraha
- .4 Monumen
- .5 Penghargaan secara adat
- .6 Adipura
- .7 Penghargaan lainnya

003 Hari Raya/Besar

- .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
- .2 Hari Raya Keagamaan
- .3 Hari Ulang Tahun (HUT)
- .4 Hari Besar Internasional

004 Ucapan

- .1 Ucapan Terima kasih
- .2 Ucapan Selamat
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan-ucapan lainnya
- .5 Spanduk

005 Undangan

006 Tanda Jabatan

- .1 Pamong Praja
- .2 Tanda Pengenal
- .3 Pejabat lainnya

007 Tanda gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat
Pemerintah

010 **URUSAN DALAM**

011 Gedung Kantor/termasuk Instalasi

- .1 Prasarana Fisik Pamong Praja
- .2 Aula, Ruangan Serba Guna
- .3 Ruang Rapat

012 Rumah Dinas

- .1 Rumah Pejabat Negara
- .2 Rumah Dinas Golongan I dan II
- .3 Rumah Dinas Golongan III
- .4 Rumah Dinas Golongan IV
- .5 Rumah/Bangunan lainnya

- .6 Tanah Untuk Rumah Dinas
- .7 Perabot Rumah Dinas
- 013 Mess/Guest House
 - .1 Penginapan
 - .2 Mess, Wisma, Hotel
 - .3 Akomodasi
 - .4 Rumah Susun/Apartemen
- 014 Jasa Air
- 015 Penerangan listrik / Jasa Listrik
- 016 Telepon / Faximile / Internet
- 017 Keamanan Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Gelar Senja
 - .2.1 Pementasan kesenian pelaksanaan Gelar Senja
 - .3 Tata Tempat
 - .3.1 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden
 - .4 Audiensi
 - .5 Alamat-alamat kantor dan pejabat
 - .6 Bandir/Umbul-umbul, Spanduk
 - .7 Penerima Tamu
 - .8 Kerjasama

020 **PERALATAN**

.1 Penawaran

021 Alat Tulis

022 Mesin Kantor

.1 Manual

.2 Elektronik

023 Perabot Kantor

024 Alat Angkutan

.1 Orang

.2 Barang

025 Pakaian Dinas

026 Senjata

027 Pengadaan

.1 Penunjukan Langsung

.2 Lelang

028 Inventaris

.1 Penghapusan

029 Pengurusan Kendaraan

030 **KEKAYAAN DAERAH**

031 Sumber Daya Alam (Barang-barang tidak bergerak (tanah, kebun, dll)

032 Asset Daerah (Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, dll)

033 Barang-barang tidak bergerak (monument)

- 034 Alat-alat besar
- 035 Hewan
- 036 Barang persediaan dalam gudang
- 037 Alat pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatan Kantor/pabrik
- 039 Peralatan rumah sakit

- 040 **PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI**
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan
 - .9 Kerjasama antar perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 045 Kearsipan
 - .1 Ekspedisi
 - .2 Salah kirim
 - .3 Pola Klasifikasi Arsip
 - .4 Surat Pengantar

- .5 Pembinaan/Penataan berkas
 - .6 Penyusutan arsip
 - .61 Jadwal Retensi Arsip
 - .62 Pemindahan Arsip.
 - .63 Penilaian Arsip
 - .64 Pemusnahan Arsip
 - .65 Penyerahan Arsip
 - .66 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .67 Daftar Pencarian Arsip
 - .7 Pembinaan Kearsipan
 - .71 Bimbingan Teknis, Sosialisasi
 - .8 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
 - .81 Fumigasi
 - .82 Kamper
 - .9 Pengawetan/Konservasi/Restorasi
 - .10 Akuisisi Arsip
 - .11 Arsip Media Baru/Alih Media
- 046 Sandi (meliputi : Sarana Sandi/Pemeliharaan)
- 047 Data Elektronik
- 050 **PERENCANAAN** meliputi : Pola Umum Pembangunan jangka panjang, REPELITA, Perencanaan umum DEPDAGRI, Repelita Daerah, Program Pembangunan Nasional (Propernas), Program Pembangunan Daerah (Properda) DUK, DIK, DUP, DASK, RASK, Laporan Fisik dan Keuangan Proyek Pembangunan, SIAP, TENDER, Pemborong, Laporan

Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Departemen, Musrenbangnas.

- .1 RUPD
 - .11 Pelita Daerah, Tambahan kode wilayah
 - .12 Bantuan Pembangunan Daerah tambah kode lainnya
 - .13 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - .14 Rencana Strategik (Renstra)
- .2 Program Pembangunan Nasional (Propernas)
- .3 Program Pembangunan Daerah (Properda)
- .4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

051 Bidang Pemerintahan

Klasifikasi di sini : Proyek prasarana fisik pemerintahan.

- .1 DUP
- .2 DASK
- .3 RASK

052 Bidang Politik

- .1 Laporan Keuangan
- .2 Laporan Pelaksanaan Kinerja

053 Bidang Keamanan/Ketertiban

Tambahkan perincian 300 pada 053

Contoh : Proyek Batas Wilayah Darat 053.311

054 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tambahkan perincian 400 pada 054

055 Bidang Perekonomian

056 Bidang Pekerjaan Umum

057 Bidang Pengawasan

058 Bidang Kepegawaian

059 Bidang Keuangan

060 **ORGANISASI KETATALAKSANAAN**

.1 Program Kerja

.2 Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan

.3 Tupoksi dan Uraian Jabatan

.4 LAKIP

061 Organisasi Instansi Pemerintah

.1 Susunan Tata Kerja

.2 Tata tertib jam kerja kantor

.3 Absensi Pegawai

062 Organisasi badan non pemerintah

063 Organisasi badan internasional

064 Organisasi Badan Semi Pemerintah

065 Ketatalaksanaan/ Tata Naska /Sistem

.1 Tata Naskah Dinas

.2 Stempel

.21 Stempel Jabatan

.22 Stempel Dinas

.3 Papan nama Instansi Pemerintahan/Non Pemerintahan

.4 Perubahan Nama Instansi Pemerintah/Non Pemerintah

066 Tata Hubungan Kerja

- .1 Telaahan Tata Hubungan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 067 Sistem dan Prosedur
- .1 Telaahan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
- .1 Pemantauan Pelaksanaan
 - .2 Sistem Prosedur Kerja
 - .3 Evaluasi Pelaksanaan Sistem
 - .4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
 - .5 Rekomendasi Jabatan
 - .6 Rekomendasi Lainnya
- 069 Analisa Jabatan dan Pengukuran beban kerja
- .1 Analisa Jabatan
 - .2 Hasil Analisa Jabatan
 - .3 Penilaian jabatan struktural dan fungsional
- 070 **PENELITIAN**
- 071 Riset
- 072 Survey/Eksplorasi
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian

- .1 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri
 - .2 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta dan Instansi lain
 - .3 Kerjasama Penelitian dengan LSM
 - .4 Kerjasama Penelitian dengan Swasta (CV/PT)
- 075 Study Kelayakan
- 076 Study Kasus
- 077 Departemen
- 078 Provinsi, Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa/Kelurahan
- 080 **KONFRENSI**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di dalam negeri
- 086 Internasional di luar negeri
- 090 **PERJALANAN DINAS**
- .1 Surat Perintah Tugas
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden di Daerah
- 092 Perjalanan Menteri di Daerah
- 093 Perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur

- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah.
- 096 Perjalanan Pejabat Negara
- 097 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejaban eselon I)
- 099 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri

- 100 PEMERINTAHAN
- 101 Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
- 102 Profil Daerah, Badan, Lembaga
- 103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

110 PEMERINTAH PUSAT

- 111 Presiden

Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan,
pengangkatan,

pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.

- .1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
- .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/ Pidato

- 112 Wakil Presiden

Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan,

pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah
terima jabatan.

- .1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR
- .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/ Pidato
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle
 - .2 Penunjukan Menteri ad interim
 - .3 Sidang Kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi lihat 500.1
- 114 Departemen Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam negeri
- 115 Departemen lainnya
 - .1 Amanat Menteri lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga non Departemen
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama antar Departemen

- 120 **PEMERINTAH PROVINSI**
 - .04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah
 - .042 Monografi, tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Provinsi
 - .21 Dinas Otonom
 - .22 Instansi Vertikal
 - .23 Kunjungan Kerja
 - .24 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah

- 121 Gubernur, tambahkan kode wilayah
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,
pemberhentian, meninggal dan sebagainya.
- .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat Gubernur
- 122 Wakil Gubernur, tambahkan kode wilayah
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,
pemberhentian, meninggal dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Daerah Provinsi, tambahkan kode wilayah
Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan,Pemberhentian
dan serah terima jabatan
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 Pemerintah Provinsi
- .2 Panitia Anggaran Provinsi
- .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
- .1 Pembentukan Daerah Otonom
- .2 Pembentukan Wilayah
- .3 Perubahan Batas Wilayah
- .4 Pemekaran Wilayah
- .5 Penambahan Ibukota Provinsi, pemberian dan
penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau,
selat, jalan, dsb.
- 126 Pembagian Wilayah

- 127 Otonomi Daerah (Penyerahan Urusan)
- 128 Swapraja, penataan wilayah/daerah
- 129 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi

130 **PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

- .04 Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Kabupaten/Kota
 - .3 Monografi
 - .21 Dinas Otonom
 - .22 Instansi Vertikal

13 I Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah

Meliputi :pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terirna jabatan, pemberhentian, meninggal, memori Kepala Daerah, dan sebagainya

- .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/Walikota dan sebagainya
- .2 Sambutan/Pengarahan/Amanat Bupati/Walikota

132 Wakil Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah

Meliputi :pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal, memori Wakil Kepala Daerah dan sebagainya.

- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, meninggal, dan sebagainya.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
 - .1 Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - .2 Muspida
 - .3 Panitia Anggaran Kabupaten/Kota
 - .4 Forum koordinasi lainnya
 - .5 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
 - .3 Perubahan Batas Wilayah
 - .4 Pemekaran Wilayah
 - .5 Permasalahan Batas Wilayah
 - .6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
 - .7 Pembentukan Ibukota/Kotamadya
 - .8 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Otonomi Daerah
 - .1 Penyerahan Urusan Otonomi Daerah
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat Camat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan

- .4 Perluasan/Perubahan batas kecamatan
 - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan
 - .6 Pemindahan Ibukota Kecamatan
 - .7 Laporan Kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Kabupaten/Kota
- 140 **PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN**
- 141 Pemerintah Desa, Kelurahan
- .1 Kepala Desa, Kelurahan
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima jabatan, dan sebagainya
 - .11 Biaya Pemilihan Kepala Desa
 - .2 Badan Perwakilan Desa
Meliputi : Pembentukan, keanggotaan, kepengurusan, dan kegiatan BPD
 - .3 Perangkat Desa, kelurahan
 - .31 Sekretaris Desa
Meliputi: Pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
 - .32 Kepala Dusun
Meliputi: Pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara
 - .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa)
- .1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Desa)

- .2 Pembangunan
- .3 Anggaran Belanja Tambahan
- .4 Pendapatan Desa
 - .41 Urusan Desa
 - .42 Penerimaan yang berasal dan Pemerintah Pusat
 - .43 Penerimaan yang berasal dan Pemerintah Provinsi
 - .44 Penerimaan yang berasal dan Pemerintah Kabupaten/
Kota
 - .45 Penerimaan yang berasal dan Pajak dan Retribusi Daerah
yang diserahkan kepada Desa
 - .46 Penerimaan dan pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di
luar desa
 - .47 Pendapatan asli Desa
 - .48 Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
 - .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah hak pakai Desa
 - .11 Tanah bengkok
 - .12 Tanah titisara
 - .13 Tanah penganggonan
 - .14 Tanah desa lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa lainnya

- 144 Lembaga-lembaga Desa
 - .1 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
 - .5 Permasalahan batas Desa
 - .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
 - .7 Penghapusan Desa/Kelurahan
 - .8 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
- 147 Pembangunan Desa
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan, meliputi : pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
 - .2 Sekretaris Kelurahan, meliputi : pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
- 149 Dewan Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Rukun Kampung
- 150 **LEGISLATIF MPR / DPR / DPD**
- 151 Keanggotaan MPR

- .1 Pecalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 152 Persidangan MPR
- 153 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak/Suara/Pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR
- .1 Pecalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 156 Persidangan DPR
- .1 Sidang Pleno
 - .2 Dengar Pendapat
 - .3 Rapat Komisi

- .4 Rapat Fraksi
- .5 Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak/Suara/Pendapat DPR
 - .1 Angket
 - .2 Bertanya
 - .3 Budget
 - .4 Interpelasi
- 160 **DPRD PROVINSI**
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno

- .3 Dengar Pendapat
- .4 Rapat-rapat meliputi : Rapat Panitia Musyawarah,
Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran, dan
sebagainya
- .5 Reses
- .6 Fraksi
- .7 Peninjauan studi banding
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak/Suara/Pendapat
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi

- 170 **DPRD KABUPATEN / KOTA**
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno

- .3 Dengar Pendapat
- .4 Rapat-rapat
Meliputi :Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi,
Panitia Khusus, Panitia Anggaran, dan sebagainya.
- .5 Reses
- .6 Peninjauan Study Banding
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak/Suara/Pendapat
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

- 180 **HUKUM**
 - .1 Konstitusi
 - .11 Dasar Negara
 - .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 GBHN
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah
 - .3 Utang/Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notariat

182 Pidana

- .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

183 Peradilan

- .1 Jenis-jenis Peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
 - .112 Pengadilan Tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .12 Peradilan Agama Islam
 - .121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
 - .122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - .123 Mahkamah Agung Agama Islam
 - .13 Peradilan Militer
 - .131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
 - .132 Mahkamah Tinggi Militer
 - .133 Mahkamah Agung Militer
 - .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
 - .15 Peradilan Koneksitas
- .2 Upaya-upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kasasi

- .23 Derden Verzet
- .24 Peninjauan Kembali
- .25 Perjanjian Damai diluar pengadilan
- .3 Eksekusi
- .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
- .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
 - .52 Pelayanan dan perlindungan hukum
 - .53 Sengketa Hukum
 - .54 Registrasi Perkara
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Paspor
 - .3 Exit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
 - .6 Suaka Politik
- 186 Kepenjaraan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang-undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-undang

- .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Provinsi
 - .342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - .343 Tata Perundangan
 - .344 Peraturan Perundangan Lainnya
- .4 Keputusan
 - .41 Presiden
 - .42 Menteri
 - .43 Lembaga Non Departemen
 - .44 Gubernur
 - .45 Bupati/Walikota
- .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Non Departemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati/Walikota
- .6 Edaran
 - .61 Presiden
 - .62 Menteri

- .63 Lembaga Non Departemen
- .64 Gubernur
- .65 Bupati/Walikota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 **HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama dengan Negara Asing
 - .1 Bilateral
 - .2 Multilateral
 - .3 Regional (ASEAN)
 - .4 Internasional
 - .5 Bantuan Luar Negeri/Hibah
- 194 Perwakilan RI di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsultan
 - .3 Kuasa usaha
 - .4 Atase
- 195 PBB
 - .1 UNESCO
 - .2 UNICEF
 - .3 FAO

- .4 UNHCR
 - .5 WHO
 - .6 Organisasi lainnya
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 MOU

200 POLITIK

200 POLITIK

- 201 Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
- .1 Pembinaan Idiologi Pancasila
 - .2 Kesatuan bangsa organisasi kekuatan sosial politik
 - .3 Organisasi Masyarakat
 - .4 Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya.
 - .5 Keadaan politik luar negeri.
 - .6 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan.
 - .7 Hasil evaluasi dan Tata mengenai Ipoleksosbud,
Kantibmas
 - .8 PARPOL
 - .81 Pendirian/pembentukan PARPOL
 - .82 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
 - .83 Program Kerja, data kegiatan PARPOL
 - .84 Pembinaan PARPOL

- .85 Hasil Munas/Musda PARPOL
 - .86 Struktur/kepengurusan, perkaderan dan keanggotaan PARPOL.
 - .87 Data inventaris dan keuangan PARPOL
 - .9 Partai/Organisasi Terlarang
 - .91 Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
 - .92 Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang.
 - .93 Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang.
 - .94 Daftar berkala mengenai keadaan anggota/ partai terlarang
- 202 Organisasi Masyarakat
- .1 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang.
 - .2 Pembentukan Organisasi
 - .3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - .4 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi.
 - .5 Program kerja organisasi
 - .6 Munas/Musda Tk. I dan Tk. II
 - .7 Pembinaan Organisasi
 - .71 Kegiatan Organisasi
 - .72 Daftar inventarisasi kekayaan organisasi
 - .73 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - .74 Laporan kegiatan organisasi

- 203 Kebijakan Umum
- 204 Orde Lama
- 205 Orde Baru
- 206 Orde Reformasi

- 210 **KEPARTAIAN**
- 211 Partai Peserta Pemilu
- 212 Partai Bukan Peserta Pemilu
- 213 Keanggotaan Partai (Kartu Tanda Anggota)
- 214 Pendirian Parpol
 - .1 AD/ART Partai
 - .2 Bantuan Keuangan Partai
- 215 Pembubaran Partai
- 216 Pengurus Partai
 - .1 Pimpinan Pusat
 - .2 Pimpinan Wilayah
 - .3 Pimpinan Cabang
 - .4 Pimpinan Anak Cabang
 - .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai

220 **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

221 Berdasarkan Perjuangan

- .1 Perintis Kemerdekaan
- .2 Angkatan '45
- .3 Angkatan '66
- .3 Veteran

222 Berdasarkan Kekaryaan

- .1 PEPABRI
- .2 Wreda Tama
- .3 Pensiunan PNS

223 Berdasarkan Keagamaan

- .1 Nahdatul Ulama
- .2 Muhammadiyah
- .3 Persis
- .4 dan lain-lainnya

224 Berdasarkan Kedaerahan/Lembaga Adat

225 Lembaga Swadaya Masyarakat

230 **ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**

231 Organisasi Kesehatan

- .1 Ikatan Dokter Indonesia
- .2 Ikatan Bidan Indonesia
- .3 Ikatan Perawat Indonesia

232 Organisasi Guru

- .1 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Organisasi Sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
 - .5 dan Lain-lainnya
- 234 Organisasi Advokat/Pengacara Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan
 - .1 Persatuan Wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
- 238 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
- 239 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
 - .1 Organisasi Arsiparis
 - .2 Organisasi Pustakawan
- 240 **ORGANISASI PEMUDA**
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Organisasi Pemuda Keagamaan
- 245 Organisasi Pemuda Kepartaian

246 Gerakan Pemuda Marhaenis

250 **ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN**

251 Organisasi Pekerja

.1 Federasi Buruh Seluruh Indonesia

.2 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

252 Organisasi Buruh Internasional

253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

255 Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)

260 **ORGANISASI WANITA**

261 Dharma Wanita

262 Persatuan Wanita Republik Indonesia

263 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

264 Pemberdayaan Perempuan (Wanita)

265 Persit Kartika Chandra

266 Bhayangkari

267 Kongres Wanita Indonesia

268 BKOW (Bdan Koordinasi Organisasi Wanita)

269 LSM Wanita

270 **PEMILIHAN UMUM**

271 Pencalonan

- 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
- 273 Kampanye/Alat Peraga Kampanye/Dana
- 274 Petugas Pemilu
 - .1 Pendaftaran Pemilu
 - .2 Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana/Prasarana Pemungutan Suara
 - .1 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - .2 Kendaraan/Transportasi
 - .3 Surat Suara
 - .4 Kotak Suara
 - .5 Bilik Suara
 - .6 Tinta
- 277 Pemungutan Suara/Penghitungan Suara/Hasil Pemilu
- 278 Sarana Untuk Penyelenggaraan PEMILU
- 279 Anggaran Pemilu

- 280 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
- 281 Panitia Pemilihan Indonesia
- 282 Pemilihan Daerah Provinsi
 - .1 Pencalonan
 - .2 Tanda Gambar meliputi : Personalia/Keanggotaan KPU Provinsi)
 - .3 Kampanye
 - .4 Petugas Pemilu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)

- .5 Pemilih
 - .6 Sarana
 - .61 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - .62 Kendaraan/Transportasi
 - .63 Surat Suara
 - .64 Kotak Suara
 - .65 Bilik Suara
 - .66 Tinta
 - .7 Pemungutan Suara
 - .8 Hasil Pemilu meliputi : Perhitungan Suara, Sidang paripurna, Pelantikan, Sumpah /Janji
- 283 Pemilihan Daerah Kabupaten/Kota
- .1 Pencalonan
 - .2 Tanda Gambar meliputi : Personalia/Keanggotaan KPU Provinsi)
 - .3 Kampanye
 - .4 Petugas Pemilu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)
 - .5 Pemilih
 - .6 Sarana
 - .61 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - .62 Kendaraan/Transportasi
 - .63 Surat Suara
 - .64 Kotak Suara
 - .65 Bilik Suara
 - .66 Tinta

- .7 Pemungutan Suara
- .8 Hasil Pemilu meliputi : Perhitungan Suara, Sidang Paripurna, pelantikan, Sumpah / Janji
- 284 Panitia Pemilihan Kecamatan
- 285 Panitia Pemungutan Suara
- 286 Sosialisasi PEMILU
- 287 Panwaslu
- 288 Pelanggaran Pemilu
- 289 Pemantauan Pemilu
- 290 Sengketa Pemilu

- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN**
- 300 Keamanan dan Ketertiban Umum
 - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
 - .2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan.
 - .3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan /ketertiban umum.
 - .4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan.
 - .5 Laporan dari instansi yang berwenang.
 - .6 Laporan adanya kejadian teroris.
 - .7 Pengamanan Sidang (tamu Negara)
 - .8 Pengawasan pejabat
- 300 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 301 Pengawasan Trantibum

- 302 Pengawasan Pelaksanaan Perda
- 303 Pembinaan/penyuluhan pelanggaran Perda
- 304 Patroli Wilayah

310 **PERTAHANAN**

- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Perbatasan

320 **KEMILITERAN**

- 321 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
 - . 1 TNI Masuk Desa
- 324 Latihan Militer dan Bela Negara
- 325 Kekayaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
 - .1 AMD
- 326 Fasilitas Militer meliputi : Barak, Persenjataan, Markas

330 **KEAMANAN**

- 331 Kepolisian
 - .1 Polisi Pamong Praja

- .2 Keamanan Rakyat
- .3 Satuan Pengaman
- .4 Keamanan Lingkungan
- .5 Jaga Wana
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Minuman Keras/Narkotika/Zat Adiktif Lainnya
Meliputi : Minuman keras/narkotika/zat adiktif lainnya yang memiliki izin dan dipergunakan untuk campuran bahan penelitian serta kesehatan
- 339 Himbauan/Pengarahan/Sosialisasi/Larangan
- 340 **PERTAHANAN SIPIL**
 - .1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
 - .11 Pengangkatan/pemberhentian anggota Hansip
 - .12 Pengarahan dan pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
 - .14 Pembinaan anggota Hansip/Linmas
 - .15 Penghargaan anggota Hansip
 - .16 Hansip/Linmas lanjut usia

- .17 Data Matrik Hansip dan Menwa
- .18 Pendidikan/latihan Hansip dan Menwa
- .19 Latihan Ketrampilan PAM Swakarsa
- .2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
- .21 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh
- .22 Pemberian tali asih bagi anggota
- 341 Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- 342 SATPAM
- 350 **KEJAHATAN**
- 351 Makar/Pemberontakan/Subversif/Organisasi Terlarang
- 352 Pembunuhan, Penemuan Mayat
- 353 Pencurian/Penyelundupan/Penganiayaan/Perampasan
- 354 Narkotika, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya
 - .1 Kepemilikan
 - .2 Mengedarkan/Mendistribusikan
 - .3 Menggunakan
- 355 Pemalsuan
 - .1 Uang
 - .2 Ijazah
 - .3 Kejahatan Pemalsuan Lainnya
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
- 357 Kejahatan/Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - .1 Kekerasan Fisik

- .2 Perkosaan
 - .3 KTD (Kehamilan Tidak Diharapkan)
 - .4 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - .5 Penelantaran
 - .6 Pelecehan Seksual
 - .7 Pencabulan
 - .8 Perdagangan Wanita
 - .9 Risalah Korban
- 358 Kenakalan Remaja
- 359 Kejahatan lainnya
- 360 **BENCANA**
- .1 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- 361 Gunung Berapi
- 362 Gempa
- 363 Angin Topan/Lissus/Badai/Putting Beliung, dll
- 364 Tanah Longsor
- 365 Kekeringan
- 366 Banjir /Tanah Longsor
- 367 Kebakaran
- .1 Pemadam Kebakaran
 - .2 Mobil Pemadam

368 Tsunami

370 **KECELAKAAN / SAR**

371 Search And Rescue (Regu Penyelamat)

.1 Kapal Patroli

.2 Mobil Patroli

372 Pelatihan

.1 Latihan SAR

.2 Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam

.3 Pelatihan manajemen bagi pejabat

.4 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP

.5 Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran

373 Satkorlak dan Satlak PBP

374 Kecelakaan Sungai/Telaga/Waduk/Danau

375 Kecelakaan Pendakian Gunung

376 Kecelakaan Listrik

377 Bunuh Diri

378 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

379 Kecelakaan Udara

380 Kecelakaan Laut

381 Kecelakaan lainnya

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

401 Keluarga Miskin

402 Kompensasi BBM/Bantuan Langsung Tunai (BLT)

403 Penyaluran Beras Miskin (Raskin)

410 **PEMBANGUNAN DESA**

411 Pembinaan Usaha Gotong Royong

.1 Swadaya Gotong-Royong

.11 Penataan Gotong-Royong

.12 Gotong-Royong Dinamis

.13 Gotong-Royong Statis

.14 Pungutan

.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)

.21 Pembinaan

.22 Klasifikasi

.23 Proyek

.24 Musyawarah

.25 Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat
Desa

.3 Latihan Kerja Masyarakat

.31 Kader Masyarakat

.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

.33 Pusat Latihan

.34 Kursus-kursus

.35 Kurikulum/Silabus

.36 Keterampilan

.37 Pramuka

.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- .41 Program
- .42 Pembinaan Organisasi
- .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .52 Peragaan
 - .53 Sosio Drama
 - .54 Siaran Pedesaan
 - .55 Penyuluh Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
 - .61 Kelompok Tani
 - .62 Rukun Tani
 - .63 Subak
 - .64 Dharma Tirta
- .7 Karang Taruna
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produksi Desa
 - .11 Pengolahan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Keuangan Desa
 - .21 Perkreditan Desa
 - .22 Inventarisasi Data
 - .23 Perkembangan/Pelaksanaan
 - .24 Bantuan/Stimulans

- .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
- .3 Koperasi Desa
 - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - .32 Koperasi Unit Desa (KUD)
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
 - .42 Pengarahan
 - .43 Pusat
 - .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
 - .51 Pusat
 - .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
 - .61 Bantuan Langsung
 - .62 Bantuan Keserasian
 - .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
 - .1 Prasarana Desa
 - .11 Pembinaan
 - .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan

- .3 Masyarakat Desa
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
- .4 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Desa
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagian
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi

- .32 Penyusunan Pola Tata Desa
- .33 Aplikasi Tata Desa
- .34 Pemetaan
- .35 Pedoman Pelaksanaan
- .36 Evaluasi
- .37 Penataan Kawasan Ruang
- .38 Kawasan Khusus
- .4 Perlombaan Desa
- .41 Pedoman
- .42 Penilaian
- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 416 Penerapan dan Pendayagunaan Teknologi Desa
 - .1 Kerjasama Teknologi Desa
 - .11 Kerjasama dengan LSM
 - .12 Evaluasi dan Pemantauan

- .13 Program
- .14 Informasi Teknologi tepat Guna
- .15 Seminar/Lokataria Teknologi Desa
- .2 Teknologi Pertanian Desa
 - .21 Penyuluhan
 - .22 Pelatihan
 - .23 Permasalahan Teknologi
 - .24 Evaluasi
- .3 Teknologi Industri Rumah Tangga
 - .31 Penyuluhan
 - .32 Pelatihan
 - .33 Permasalahan
 - .34 Evaluasi

420 **PENDIDIKAN**

- .1 Pendidikan Khusus. Klasifikasikan di sini : Pendidikan Putra Putri Irian Jaya

421 Sekolah

- .1 Pra Sekolah/Taman Bermain/Taman Kanak-kanak
- .2 Sekolah Dasar
- .3 Sekolah Menengah
- .4 Sekolah Tinggi
- .5 Sekolah Kejuruan
- .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
- .7 Kegiatan Pelajar

- .71 Reuni, Dharmawisata, Lomba
- .72 Pelajar teladan
- .8 Kegiatan Mahasiswa
- .81 Resimen Mahasiswa
- .9 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- .10 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, OSPEK
 - .2 Tahun Pelajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah - Klasifikasi di sini SPP
 - .5 Bea Siswa
 - .6 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
 - .7 Ijazah
 - .8 Statistik Persekolahan
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium, Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Widyawisata, KKN, Anjangsana, Study Banding, Orientasi
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Desertasi
 - .7 Ujian
 - .71 Ujian Komperatif

- .72 Ujian Kompetensi
- .72 Ujian Sertifikasi
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
 - Klasifikasi di sini : Disini Guru teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 pusat kegiatan mahasiswa
 - .14 Perpustakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah
 - .4 Sistem informasi pendidikan
- 426 Keolahragaan**
 - .1 Cabang Olah Raga
 - .2 Sarana/Prasarana
 - .21 Gedung olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam renang
 - .25 Peralatan olahraga
 - .3 Peserta Olah Raga

Klasifikasi di sini : PON, Porsada, Olimpiade, Porseni dan sebagainya

.4 Organisasi Olahraga (KONI)

427 Kepemudaan

Meliputi Organisasi dan Kegiatan Remaja

Klasifikasi di sini : Gelanggang Remaja/Gelanggang Generasi Muda

428 Kepramukaan

429 Pendidikan Kedinasan

Untuk Departemen Dalam Negeri lihat 890

430 **KEBUDAYAAN**

431 Kesenian

.1 Cabang Kesenian

.2 Organisasi Kesenian

.3 Sarana/Prasarana

.31 Gedung Kesenian

.32 Padepokan

432 Kepurbakalaan

.1 Museum

.11 Pelayanan Museum

.12 Pengawasan Museum

.13 Promosi Museum

.14 Perijinan Permuseuman

- .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi termasuk pemugaran
 - .22 Benda, Monumen
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 Festival, Pentas Seni

- 440 **KESEHATAN**
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gigi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker
 - .5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Kesehatan Ibu dan Anak
 - .9 Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
 - .10 Gerakan Jumat Bersih
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan

- .3 Obat Generik
- .4 Pemalsuan
- .5 Obat terlarang
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambusia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
 - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveillance
 - .34 Rabies, Antraks
 - .35 Leptosirosis
 - .36 Chikungunya
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)/Demam Berdarah
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .45 Flu Burung

- .46 Flu Babi
 - .5 Hygiene Sanitasi
 - .51 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
 - .54 Pencemaran Udara
 - .55 Kesehatan Institusi
 - .56 Pencemaran Air
 - .6 Pemberantasan penyakit tidak menular
 - .61 Hipertensi
 - .62 Stroke
 - .63 Diebetus Militus (DM)
 - .7 DEKOPENSATIOKORDIS
 - .71 PPOM
 - .72 Asma
 - .73 Kecelakaan Lalu Lintas
 - .74 Psikosis
- 444 Gizi
- .1 Kekurangan Makanan
 - .2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .3 Keracunan Makanan
 - .4 Menu Makanan Rakyat
 - .5 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .6 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

.7 Gondok Endemik (Gaky)

445 Rumah Sakit

.1 RSUP

.2 Rumah Sakit Jiwa

.3 Rumah Sakit Mata

.4 Puskesmas Keliling

.5 Balai Kesehatan (Poliklinik)

.6 Balai Kesehatan Ibu dan Anak

.7 Rumah Bersalin

.8 Posyandu

.9 Rumah Sakit / Balai Kesehatan Lainnya

.10 Laboratorium Kesehatan

446 Tenaga Medis

.1 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

.2 Diklat Tenaga Kesehatan (medis)

.3 Diklat Tenaga Kesehatan (para medis)

.4 Pendidikan Kesehatan

447 Alat Medis

.1 Pengadaan alat Kesehatan

.2 Penyimpanan Alat Kesehatan

.3 Standarisasi Alat Kesehatan

.4 Penghapusan Alat Kesehatan

448 Pengobatan Tradisional

.1 Pijat

- .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun / Paranormal
 - .5 Akupuntur
 - .6 Rukiyah
- 449 Apotek
- .1 Surat Ijin Praktek (SIP)
 - .2 Surat Ijin Kerja (SIK)

450 **AGAMA**

- 451 Islam
- .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat, Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar

- .47 Buku
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama, Wakaf, Baitulmal dan Sebagainya
 - .6 Peradilan
 - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
- .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katholik
- .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama Rohaniawan, Pastur
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
- .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama Rohaniawan

- .4 Mazhab
- .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Budha
- 456 Urusan Haji
 - .1 Ongkos Naik Haji (ONH)
 - .2 Badan Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH)
 - .3 Manasik
- 457 Umroh
- 460 **SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat mata
 - .2 Cacat tubuh
 - .3 Cacat mental
 - .4 Bisu/tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila

- .4 Anak Nakal
- .5 Tuna Wisma
- 463 Kesejahteraan Anak/ Keluarga
 - .1 Anak putus sekolah
 - .2 Ibu teladan
 - .3 Anak Asuh
 - .4 Orang Tua Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - .1 Pahlawan
Meliputi : penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
 - .2 Perintis Kemerdekaan
Meliputi : pembinaan, penghargaan, dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan dan jandanya
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Rehabilitasi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban bencana
 - .2 Pencarian dana untuk sumbangan
Meliputi : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar, dan Sebagainya
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Panti Jompo

- .5 Yayasan Sosial Lainnya
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing
 - Meliputi: Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana, dan sebagainya
 - .2 Pemberdayaan Masyarakat
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 **KEPENDUDUKAN**
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia

- .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- .24 Daerah Terbelakang
- .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusuhan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- .5 Kewarganegaraan
 - .51 WNI Asli
 - .52 WNI Keturunan
 - .53 Permohonan Kewarganegaraan
 - .54 Permohonan Ganti nama
 - .55 Tidak berkewarganegaraan/Stateless

472 Pencatatan Sipil

- .1 Kelahiran, Kematian dan Advokasi

- .11 Kelahiran
- .12 Kematian
- .13 Advokasi Kelahiran dan Kematian
- .14 Adopsi
- .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan dan Perceraian
- .3 Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi
 - .31 Pengangkatan Anak
 - .32 Pengakuan Anak
 - .33 Pengesahan Anak
 - .34 Perubahan Akta
 - .35 Pembatalan Akta
 - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Anak
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - .41 Akibat Perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Non Perkawinan

- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI dan WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi data
 - .2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengolahan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian Vital Penduduk
 - .33 Penduduk Non Registrasi
 - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
 - .41 Media Elektronik
 - .42 Media Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi

- .13 Fertilitas
- .14 Kesehatan Reproduksi
- .15 Morbiditas Penduduk
- .16 Mortalitas Penduduk
- .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Usia Lanjut
 - .24 Gender
- .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
 - .42 Pelayanan Pengembangan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
 - .44 Partisipasi Masyarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
 - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
 - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat

- .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- .6 Transmigrasi
 - .61 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
 - .62 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha didaerah transmigrasi
 - .63 Kerjasama dibidang transmigrasi
 - .64 Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik
 - .65 Permukiman transmigrasi
 - .66 Penggunaan tanah permukiman transmigrasi.
 - .67 Penyelesaian masalah tanah dilokasi permukiman transmigrasi
 - .68 Tata Ruang pemukiman transmigrasi.
 - .69 Sarana pemukiman transmigrasi
- .7 Pengerahan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi
 - .71 Pemberangkatan transmigrasi
 - .72 Penempatan transmigrasi
 - .73 Penampungan transmigrasi (transito) dan pelatihan transmigrasi
 - .74 Pembinaan masyarakat transmigrasi
 - .75 Penilaian transmigrasi teladan
- 475 Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Pendudukan
 - .1 Indikator Kependudukan
 - .11 Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan

- .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Penduduk
 - .21 Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
 - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - .3 Analisis Dampak Kependudukan
 - .31 Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan
 - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
 - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
 - .41 Lembaga Internasional
 - .42 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
 - .43 Lembaga Usaha Swasta
 - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
 - .51 Lembaga Pemerintah
 - .52 Pemerintah Provinsi dan Kota
 - .53 Pemerintah Kabupaten
 - .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 Keluarga Berencana**
- .1 Alat kontrasepsi
 - .2 KB Lestari

- .3 KB Mandiri
- .4 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
- .5 Pos KB Desa
- .6 Akseptor KB

480 **MEDIA MASSA**

481.1 Penerbitan

- .11 Surat kabar
- .12 Majalah/Buletin
- .13 Buku
- .14 Penerjemahan
- .15 Layanan Informasi/Laeflet
- .16 Klarifikasi Berita
- .17 Dress Reliase
- .18 Masukan Analisis Gubernur
- .19 Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
- .20 Jurnal Mingguan Pendapatn Umum
- .2 Liputan Media Massa
 - .21 Liputin Rutin
 - .22 Liputin Khusus
 - .221 Arus Lebaran
 - .222 Pemberangkatan dan kepulangan haji.
- .3 Pencabutan Surat Ijin
 - .31 Surat Kabar

- .32 Majalah
 - .33 Buletin
 - .4 Laporan dan hasil pemberitaan
 - .41 Surat Kabar
 - .42 Majalah
 - .43 Buletin
 - .44 Kegiatan Bidang
- 482 Radio
- .1 RRI
 - .11 Siaran pedesaan, jangan diklasifikasikan di sini, lihat 411.54
 - .2 Non RRI
 - .3 ORARI
 - .4 RAPI
 - .5 Luar Negeri
- 483 Televisi
- .1 TVRI
 - .2 TV Swasta
- 484 Film
- 485 Pers
- .1 Kewartawanan
 - .11 Wawancara/Audiensi Wartawan
 - .12 Informasi Nasional
 - .13 Pembentukan Organisasi Profesi

- .14 Terjadinya Kasus Penghina, Pemukulan,
Penganiyaan terhadap wartawan
 - .15 Penyalahgunaan Profesi
 - .16 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - .17 Temu Pers/Konferensi Pers
 - .18 Pers Tour
 - .19 Bantuan Kepala/Dari Organisasi Profesi Wartawan
 - .20 Kebijakan Pimpinan/Pendidikan Jurnalistik
- 486 Grafika/Reklame
- .1 Ketentuan Pemasangan
 - .2 Penerbitan
- 487 Penerangan
- .1 Pameran non komersial
 - .2 Publikasi
 - .3 Pendirian Information Center
- 488 Hubungan masyarakat
- 489 Internet
- .1 Internet Protocol Address (IP Address)
 - .2 Situs/WebSite/Homepage/Surat Elektronik (E-mail)
 - .3 Pembangunan Jaringan Interkoneksi
- 490 INFORMASI KOMUNIKASI
- 491 Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom
- .1 Training Foto Grafi
 - .2 Training Berita Jurnalistik

- .3 Rakorda Infokom
- .4 Rakor Pengendalian Kegiatan
- .5 Pelayanan Informasi melalui media Tradisional
 - .51 Karawitan
 - .52 Wayang Kulit
 - .53 Lawakan
 - .54 Wayang Orang
- .6 Bimtek Infokom
- .7 Dialog Interaktif
 - .71 Televisi(TVRI) Nasional, Swasta
 - .72 Radio
- 492 Hubungan Antar Lembaga
 - .1 Organisasi Kemasyarakatan
 - .11 Wahana Komunikasi Masyarakat
 - .12 Bimtek Pengurus LKM
 - .13 Bahan Informasi Cetak LKM
 - .14 Fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Media.
 - .15 Pelatihan motivasi Kapa Narkoba
 - .16 Pembinaan LSM/Upaya PPBN
 - .17 Bahan Informasi, Sosialisasi PPBN
 - .2 Lembaga Pemerintah
 - .21 Pertemuan Bakohumas
 - .22 Pertemuan Kehumasan
 - .23 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

- .3 Luar Negeri
 - .31 Promosi Luar Negeri
 - .32 Kunjungan Wartawan Asing
- 493 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
 - .1 Himpunan Naskah Sambutan
 - .2 Himpunan Dialog Interaktif
 - .3 Himpunan Naskah Rubrik
 - .4 Pembuatan Kolom khusus Hasil-hasil Pembangunan
 - .5 Klasifikasi Naskah Sambutan
 - .6 Himpunan Naskah KeynoteSpeaker

500 PEREKONOMIAN

500 PEREKONOMIAN

- .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan pangan
- 502 Pengadaan sandang
- 503 Perijinan pada umumnya. Untuk perijinan suatu bidang, klasifikasikan pada masalahnya

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini : Tataniaga

- .1 Promosi perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan
 - .13 Pameran (Pameran non komersial lihat 487.1)

- .14 Event-event
- .15 Lomba-lomba (desain, busana, kerajinan)
- .2 Pelelangan, distribusi
 - .21 Pemasaran Sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
- .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
- .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanjangan
 - .43 Ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi
- .5 Perdagangan antar Pulau
 - .51 Kerjasama Bahan Baku
 - .52 Industri Pemasaran
 - .53 Kontrak
- .6 Tera/Uji Timbang
 - .61 Tera Ulang Ukuran
 - .62 Takaran

- .63 Timbangan
- .64 Kalibrasi
- .65 Cap Tanda tera
- .66 Biaya Tera
- .7 Bantuan Peralatan
 - .71 Proposal
 - .72 Surat Perjanjian/kontrak
 - .73 Serah terima
- .8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- .9 Kemetrologian
 - .91 Standart tingkat tiga
 - .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
 - .93 Ukuran Metrologi
 - .94 Laboratorium Metrologi
 - .95 Tanki Ukur Mobil
 - .96 Meter Taxi
 - .97 KWH Meter
 - .98 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan pokok. Tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, dan sebagainya
 - .2 Pasar
 - .3 Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Pedagang Kaki Lima, Kios
 - .4 Operasi Pasar

512 Ekspor

- .1 Ekspor Hasil Industri
- .2 Ijin Ekspor
- .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
- .4 Manajemen Perdagangan Internasional
- .5 Ekspor hasil Industri
 - .51 Kebijakan
 - .52 Pemasaran
- .6 Pemberitahuan Ekspor Barang
- .7 Pengawasan Mutu Barang
- .8 Eksportir terdaftar
- .9 Evaluasi dan Pelaporan

513 Import

- .1 Ijin Import
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
- .2 Standar Mata Dagang Import
- .3 Manajemen Perdagangan Internasional
- .4 Kegiatan Import
 - .41 Pembinaan Import
 - .42 Pengendalian Import
 - .43 Pemantauan import
- .5 Faktor-faktor Pendukung
- .6 Pengawasan Mutu Barang Import

- .7 Penyaluran Kegiatan Import
 - .71 Bahan Konsumsi
 - .72 Bahan Baku
 - .73 Bahan Penolong
- .8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - .1 Kerjasama Bahan Baku
 - .2 Industri Pemasaran
 - .3 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng.
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka usaha perdagangan
- 518 Koperasi
 - (Untuk BUUD, KUD, lihat 412.31 – 412.32)
 - .1 Bina Usaha Koperasi
 - .11 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
 - .111 Koperasi Perkebunan

- .12 Koperasi Perikanan dan Peternakan
 - .121 Koperasi Perikanan
 - .122 Koperasi Peternakan
- .13 Permodalan Koperasi
 - .131 Pemupukan Modal
 - .132 Pemanfaatan Modal
 - .133 Perbankan dan asuransi
 - .134 Permodalan Luar Koperasi
 - .135 Kredit Program Umum
 - .136 Kredit Program Khusus
- .14 Distribusi dan Jasa Koperasi
 - .141 Distribusi Bahan Pokok
 - .142 Distribusi Aneka Bahan
 - .143 Distribusi Kerjasama Niaga
 - .144 Jasa Angkutan
 - .145 Jasa Perumahan
 - .146 Aneka Jasa
- .15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
 - .151 Koperasi Kelistrikan
 - .152 Koperasi Industri
 - .153 Koperasi Telekomunikasi
- .2 Bina Lembaga Koperasi
 - .21 Organisasi Koperasi
 - .211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi

- .212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
- .213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
- .214 Perangkat Koperasi
- .215 Pengakuan Koperasi Sekolah
- .216 Tertib Organisasi koperasi
- .217 Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan
- .218 Bimbingan Kesadaran Hukum
- .22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
 - .221 Rapat Anggota Koperasi
 - .222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
 - .223 Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
 - .224 BPP KUD
- .3 Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - .31 Pembinaan Usaha
 - .311 Pembinaan Usaha Kecil
 - .312 Pembinaan Usaha Menengah
 - .32 Kredit Usaha
 - .321 Kredit Usaha Kecil
 - .322 Kredit Usaha Menengah
 - .33 Pengawasan Usaha
 - .331 Pengawasan Usaha Kecil
 - .332 Pengawasan Usaha Menengah
- .4 Bina Tata Urusan Koperasi

- .41 Klasifikasi KUD
- .42 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
- .43 Klasifikasi KUD Mandiri
- .5 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
 - .51 Administrasi KUD
 - .52 Administrasi Koperasi Perkotaan
 - .53 Karyawan/Manager Koperasi
 - .54 Sumber Daya Manusia
 - .55 TKST
 - .56 Penyaluran Alat Sekolah
 - .57 Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
- .6 Akuntansi
 - .61 Akuntansi KUD
 - .62 Akuntansi Koperasi Perkotaan
 - .63 akuntansi Koperasi Sekunder

520 **PERTANIAN**

521 Tanaman Pangan

- .1 Program
 - .11 Bimas/Inmas
 - .12 Kredit Usaha Tani (KUT)
 - .13 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
- .2 Produksi
 - .21 Padi/Panen

- .211 Sawah
- .212 Gogo
- .213 Hama
- .22 Palawija
 - .221 Kacang
 - .222 Jagung
 - .223 Ketela Pohon
 - .224 Ubi-ubian
 - .225 Kedelai
- .23 Hortikultura
 - .231 Sayuran
 - .232 Buah-buahan
 - .233 Tanaman hias
 - .234 Perlebahan
- .24 Panen gagal (puso)
- .25 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Sarana Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan meliputi : traktor, dan sebagainya.
 - .32 Pembibitan
 - .33 Pupuk
 - .34 Irigasi pertanian
 - .35 Rehabilitasi lahan pertanian
- .4 Perlindungan tanaman
 - .41 Penyakit

- .411 Penyakit Daun
- .412 Penyakit Batang
- .42 Hama
- .421 Hama serangga, Diklasifikasikan di sini :
Wereng, Walang Sangit, Tungro
- .422 Hama tikus dan sejenisnya
- .423 Pemberantasan hama
Meliputi: Penyemprotan,penyiangan,
geropyokan, sprayer, pemberantasan
melalui udara
- .43 Pestisida
- .5 Tanah pertanian pangan
- .51 Pesawahan
- .52 Perladangan
- .53 Kebun
- .54 Rumpon ikan laut
- .55 Lahan kritis/KTA
- .6 Pengusaha, petani
- .7 Bina usaha
- .71 Pasca panen
- .72 Pemasaran Hasi
- .73 Promosil

522 Kehutanan

- .1 Program

- .11 Hak Pengusahaan Hutan
 - .111 Data Areal HPH
 - .112 Areal Hutan
 - .113 SKHPH
 - .114 Kerja Sama
 - .115 Pembatalan/Penolakan
 - .116 Perpanjangan HPH
 - .117 Pembinaan HPH (pelanggaran dan sanksi)
- .12 Tata guna hutan
 - .121 Tata Kawasan
 - .122 Pengurusan Kawasan Hutan
 - .123 Penafsiran Hutan
 - .124 Mutasi Hutan
- .13 Tata Hutan
 - .131 Tata Hutan Sementara
 - .132 Tata Hutan Tetap
 - .133 Pembukaan Hutan
- .14 Perpetaan hutan
 - .141 Ukur dan Pemetaan
 - .142 Pengukuran
 - .143 Perpetaan
- .15 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
 - .151 Hutan Tanaman Industri Pulp
 - .152 HTI Pertukangan

- .2 Produksi dan Industri
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .23 Target Produksi
 - .24 Industri Kayu HPH
 - .25 Industri Kayu Non HPH
 - .26 Industri Non Kayu
- .3 Sarana Usaha Kehutanan
 - .31 Standarisasi Kayu dan Non Kayu
 - .32 Pengujian Hasil Hutan
 - .33 Pemasaran Hasil Hutan
 - .34 Angkutan Hasil Hutan
 - .35 Tata Usaha Hasil Hutan
 - .36 Iuran Hutan
 - .37 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
 - .38 Alat dan mesin kehutanan
- .4 Penhijauan / Reboisasi
 - .41 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
 - .411 Pembenihan
 - .412 Pegakan Benih
 - .413 Pengadaan Benih
 - .414 Pengujian dan Penyimpanan Benih
 - .415 Lalu Lintas Angkutan Benih
 - .416 Pembibitan

- .417 Pengadaan dan pengedaran Bibit Bersertifikat
- .418 Pengadaan dan pengedaran Bibit Tidak Bersertifikat
- .42 Tanaman Reboisasi
 - .421 Lahan Kritis
 - .422 Reboisasi Lahan HPH
 - .423 Rehabilitasi Tanah Hutan
 - .424 Konservasi Tanah dan Air
 - .425 Pengendalian Perladangan
- .43 Penhijauan
- .44 Aneka Usaha Kehutanan
- .5 Kelestarian Kawasan Konservasi
 - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
 - .52 Berburu. Meliputi larangan dan ijin berburu
 - .53 Kebun binatang
 - .54 Konservasi lahan
 - .55 Taman Wisata (Termasuk Laut)
 - .56 Taman Nasional
 - .57 Taman Hutan Raya
- .6 Jenis-jenis hutan
 - .61 Hutan Hidup
 - .62 Hutan Wisata
 - .63 Hutan Produksi
 - .64 Hutan lindung
- .7 Perhutanan Sosial

- .71 Sutera Alam
- .72 Minyak Kayu Putih
- .73 Perlebahan
- .8 Pengkajian Lingkungan
 - .81 Amdal UKL, UPL di dalam Kawasan Hutan
 - .82 Amdal UKL, UPL diluar Kawasan Hutan
 - .83 Bina Cinta Alam
 - .84 Kelompok Pencinta Alam
 - .85 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
 - .86 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
 - .87 LSM Lingkungan
- .9 Pengamanan Hutan
 - .91 Jaga Wana
 - .92 PPNS
 - .93 Gangguan Keamanan Hutan
 - .94 Bencana Alam
 - .95 Kebakaran Hutan
 - .96 Sengketa Hutan
 - .97 Penyakit/Hama
 - .98 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
 - .99 Alat dan Mesin Kehutanan

523 Perikanan dan Kelautan

- .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .13 Konservasi dan Suaka Laut
- .2 Budidaya/Produksi Perikanan
 - .21 Pelelangan
 - .22 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
- .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pengembangan meliputi : Pembibitan, Pemijahan Ikan, Pembenihan Ikan, dan Budi Daya Ikan
 - .32 Daerah Penangkapan/Areal Perikanan (Fishing Ground)
 - .33 Perijinan Pembudidayaan Ikan
 - .34 Ikan Hias
 - .35 Udang
 - .36 Rumput laut
 - .37 Minapadi
 - .38 Budidaya Air Tawar, meliputi : Budidaya Ikan di Kolom Air Deras dan lain-lain
 - .39 Keramba Jaring Apung (KJA)
- .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan

- .44 Pengendalian Hama dan Penyakit termasuk pemberantasannya
- .5 Pengusaha, Nelayan
- .51 Perahu Tanpa Motor / Kapal Motor / Motor Tempel
- .52 Jaring
- .53 Cold Storage
- .54 Tempat Es (Cool Room)
- .6 Hama penyakit termasuk pemberantasannya
- .7 Data perikanan
- .8 Nelayan
- .81 Perkampungan nelayan
- .82 Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan
- .9 Pelestarian ikan

524 Peternakan

- .1 Produksi
- .11 Susu Ternak Rakyat
- .12 Telur
- .13 Daging
- .14 Kulit
- .2 Sarana Usaha Peternakan
- .21 Pembibitan
- .22 Obat Hewan
- .23 Alsinak
- .24 Pakan

- .25 Kandang Ternak
- .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi Pullorum, Pemeriksaan Spesimen
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan
- .4 Perunggasan
 - .41 Ayam ras
 - .42 Ayam buras
 - .43 Itik
 - .44 Burung (termasuk sarang burung walt)
- .5 Pengembangan ternak
 - .51 Inseminasi buatan
 - .52 Pembibitan/bibit unggul
 - .53 Penyebaran ternak
 - .54 Kawasan Peternakan
 - .55 Makanan Ternak
- .6 Organisasi Peternakan
 - .61 Asosiasi Peternakan
 - .62 Kelompok Tani Ternak
- .7 Pengawasan dan Standarisasi
 - .71 Tempat Pematangan Hewan
 - .72 Laboratorium

- .73 Standarisasi Bibit Ternak
- .8 Data Peternakan
- .81 Informasi Peternakan
- .9 Pelayanan Usaha dan Pemasaran
- .91 Promosi Produksi Peternakan
- .92 Pemasaran Peternakan
- .93 Ijin Usaha Peternakan

525 Perkebunan

- .1 Program
- .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kelapa Hibrida/Kelapa Sawit, Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat/Kakao
 - .29 Aneka tanaman
- .3 Pembibitan
 - .31 Gulma
- .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Hama/Penyakit

- .42 Pestisida
- .43 Pupuk
- .44 Badra
- .5 Alat dan Mesin Perkebunan
- .6 Pengolahan lahan
- .61 Terasering

526 Ketahanan Pangan

- .1 Program Bimbingan Masal
- .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 Kelembagaan
- .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengelolaan Hasil Pangan
 - .33 Pemasaran Hasil
 - .34 Kemitraan
- .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
- .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
- .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan

- .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- .53 Sistem Informasi Pangan

527 Penyuluhan

- .1 Sumber Daya Manusia
 - .11 Penyuluh
 - .12 Pelaku Utama Pelaku Usaha
 - .13 Stake Holder
- .2 Kelembagaan
 - .21 Struktural
 - .22 Non Struktural
 - .23 Pelaku Utama Pelaku Usaha
 - .24 Lembaga Profesi
- 3. Penyelenggaraan Penyuluhan
 - 31. Program/Metode
 - 32. Promosi/Pameran/Kampanye
 - 33. Penghargaan/Lomba
 - 34. Materi

530 PERINDUSTRIAN

- .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri logam
- 532 Industri Mesin/Elektronika
- 533 Industri Kimia/Farmasi

- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri makanan/minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
 - .1 Home industri
- 537 Aneka kerajinan
 - .1 Kerajinan rakyat
- 538 Usaha Negara/BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah

- 540 **PERTAMBANGAN / KESAMUDERAAN**
- 541 Bahan Galian (Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian, Penjernihan, Pengangkutan, Penjualan, Konservasi, Penyalurannya)
 - .1 Pengusahaan
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Bahan Galian Strategis (bahan galian golongan a)
 - .21 Minyak bumi, bitumen cair, lilin, dan gas alam
 - .22 Bitumen padat, aspal
 - .23 Antrasit, batubara, batubara muda
 - .24 Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya
 - .25 Nikel, kobalt

- .26 Timah
- .3 Bahan Galian Vital (bahan galian golongan b)
 - .31 Besi, mangan molibden, vanadium, khrom, titan
 - .32 Bauksit, tembaga, timah, seng
 - .33 Emas, platina, perak, air raksa, intan
 - .34 Arsin, artimon, bismut
 - .35 Rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
 - .36 Berlium, korundum, zircon, kristal kwarsa
 - .37 Kriolot, flowispor, barit
 - .38 Yodium, brom, klor, belerang
- .4 Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a dan b (bahan galian golongan c)
 - .41 Nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, garam batu
 - .42 Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
 - .43 Yarosit, karosit, towas, alum, oker
 - .44 Batu permata, batu setengah permata
 - .45 Pasir kwarsa, kaolin, felospor, gips, bentanit
 - .46 Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap
 - .47 Marmer, batu tulis
 - .48 Batu kapur, dolomit, kalsit
 - .49 Granit, andesit, basal, tarakhit, tanah liat, dan pasir

542 Gas bumi

- .1 Pengolahan tangki, pompa, tanker
- 543 Logam mulia (Intan, Emas, Perak)
- 544 Logam
 - .1 Timah
 - .2 Alumunium, Bouksit
 - .3 Besi, termasuk besi tua
 - .4 Tembaga
 - .5 Batubara
- 545 Aneka Tambang Bahan Galian
 - .1 Air Permukaan
 - .2 Air Bawah Tanah
 - .21 Perijinan
 - .211 Sumur Artetis
 - .212 Sumur Bor
 - .213 Sumur Gali/Pasak
 - .214 Mata Air
 - .215 Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
 - .22 Sumur Pantau
 - .23 Pemasangan/penyegelan Water Meter.
 - .24 Produksi/Nilai Perolehan Air (NPA)
 - .25 Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawas Gunung Berapi

- .12 Panas Bumi
- .2 Sumur artesis, air bawah tanah
- .3 Pemetaan
 - .31 Pemetaan Geologi
 - .32 Pemetaan Rupa Bumi
 - .33 Pemetaan Permukaan Air
- .4 Sumber Daya Mineral
- .5 Hidrogeologi
- .6 Gerakan Tanah (Longsor, Amblesan)
- .7 Kerentanan Tanah
- .8 Pengawasan Pengendalian
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Kelautan, Pesisir Pantai
- 550 **PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR)
 - .13 Kecelakaan Lalu Lintas
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perijinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkutan

- .24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
- .25 Uji Mutu
- .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perijinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Alat Angkut
 - .35 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .36 Lalu Lintas
 - .37 Trayek
 - .38 Sarana/Kapal
 - .39 Kecelakaan
- .4 Angkutan Danau
 - .41 Perijinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .44 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .45 Lalu Lintas
 - .46 Trayek
 - .47 Sarana/Kapal
 - .48 Kecelakaan
- .5 Ferri
 - .51 Perijinan
 - .52 Terminal

- .53 Pelabuhan
- .54 Sarana dan prasarana Kapal
- .55 Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
- .56 Trayek
- .57 Keselamatan
- .58 Kecelakaan
- .59 Perawatan/Perbaikan
- .6 Perkeretapian
 - .61 Pintu lintasan kereta api
 - .62 Signal/Tanda Rambu
 - .63 Perijinan
 - .64 Sarana dan Prasarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie (Jalan/Jembatan)
 - .65 Trayek
 - .66 Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
 - .67 Keselamatan
 - .68 Kecelakaan
 - .68 Perawatan/Perbaikan
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .12 Pelayaran Luar Negeri
 - .13 Pelayaran Dalam Negeri
 - .14 *Pelayaran Charter/Wisata Turis*
 - .15 Mercu Suar

- .16 Pelayaran Haji
- .17 Pelayaran Khusus
- .2 Perkapalan Alat Angkutan
 - .21 Kapal Penumpang
 - .22 Kapal Barang
 - .23 Kapal Perang/Patroli/Negara
 - .24 Kapal Tanker
 - .25 Ponton/Tongkong
 - .26 Kapal Layar
 - .27 Kapal Layar Motor
 - .28 Kapal Kontainer
- .3 Pelabuhan
 - .31 Tanah/Lokasi
 - .32 Alur Layar
 - .33 Dermaga
 - .34 Terminal Penumpang
 - .35 Bangunan/Gedung/Gudang
 - .36 Perlengkapan Tambat Labuh
 - .37 Lapangan Penumpukan
 - .38 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
- .4 Pengerukan/Perawatan
 - .41 Alur Pelayaran
 - .42 Kolam Pelabuhan
 - .43 Reklamasi Pantai

- .44 Dumping Pantai
- .45 Pekerjaan Bawah Air (salvage)
- .5 Penjagaan Pantai
 - .51 Patroli Pantai
 - .52 Patroli Perawatan
 - .53 Penjaga Pantai dan Penanggulangan Keselamatan Laut (Gamat)
- .6 Angkutan Barang
 - .61 Pos
 - .62 Minyak
 - .63 Log
 - .64 Ternak
 - .65 Sembilan Bahan Pokok
 - .66 Peti Kemas/EMKL
 - .67 Muatan Umum
 - .68 Barang Dalam Negeri: Barang Luar Negeri
 - .69 Bongkar Muat
- .7 Keselamatan
 - .71 Rambu-rambu/Mercusuar
 - .72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
 - .73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
 - .74 Telekomunikasi Pelayaran
 - .75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
 - .76 Sertifikasi Awak Kapal
- .8 Kecelakaan Gangguan

- .81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
- .82 Kecelakaan Barang
- .83 Gangguan Sarana/prasarana
- .84 Pembajakan/Penyeludupan
- .85 Pencemaran
- .9 Perijinan
 - .91 Ijin Berlayar
 - .92 Ijin Perkerjaan Bawah Air
 - .93 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bantuan Kapal
 - .94 Ijin Penambahan Kantor Cabang
 - .95 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
 - .96 Ijin Usaha Angkutan Laut
 - .97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
 - .98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
 - .99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Udara/keamanan lalulintas udara
 - .11 Penerbangan Domestik
 - .12 Penerbangan Luar Negeri
 - .13 Penerbangan Haji
 - .14 Penerbangan Charter/ Non Reguler
 - .15 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan

554 Pos

- .1 Pembinaan
 - .11 Kebutuhan Fasilitas
 - .12 Rehabilitasi/Perawatan
 - .13 Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan
 - .14 Standarisasi Perangkat
 - .15 Tanah/Bangunan
 - .16 Filateli/Perangko
 - .17 Asosiasi
 - .18 Laporan dan Evaluasi
- .2 Pelayanan
 - .21 Jasa Pos
 - .22 Jasa Titipan
 - .23 Jasa Giro
 - .24 Benda Pos
 - .25 Sampul Peringatan
 - .26 Jasa Pos Elektronik
- .3 Perijinan
 - .31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan
 - .32 Pembukaan Agen/Cabang
- .4 Gangguan Sarana dan Prasarana
 - .41 Kecelakaan
 - .42 Sabotase
 - .43 Penyeludupan

555 Telekomunikasi

- .1 Telepon
 - .11 Tetap
 - .12 Bergerak
 - .13 Wartel
 - .14 IKR/G
 - .15 Email
 - .16 Faximile
- .2 Telegram
- .3 Teleks/SSB, Faximile
- .4 Satelit, internet
 - .41. Internet protocol address (IP address)
 - .42 Situs/Wibeside/Homepage/Surat elektronik (Email)
 - .43 Pembangunan jaringan interkoneksi
 - .44 Download dan upload
 - .45 Wibcamre
- .5 Stasiun Bumi, Parabola
- .6 Frekwensi dan Informatika
 - .61 Amatir Radio
 - .62 KRAP
 - .63 Radio Siaran Lokal
 - .64 Radio Konsesi Lokal
 - .65 Radio Base Station
 - .66 Internet

- .7 Pembinaan/Peneribitan/Pengawasan
 - .71 Wartel
 - .72 Frekwensi Radio Lokal
- .8 Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
- .9 Perijinan
 - .91 Amatir Radio
 - .92 KRAP
 - .93 Radio Siaran Lokal
 - .94 Televisi Siaran Lokal
 - .95 Radio Konsensi Lokal
 - .96 Radio Base Station

556 Pariwisata dan Rekreasi

- .1 Ijin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Ijin Usaha Sarana Wisata/Perhotelan
 - .12 Ijin Travel Service/Biro Perjalanan Wisata
 - .13 Ijin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
 - .14 Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- .2 Wisatawan
 - .21 Wisatawan Mancanegara
 - .22 Wisatawan Nusantara
- .3 Promosi dan Informasi Pariwisata
 - .31 Sadar Wisata
 - .32 Mandala Wisata

- .33 Tourism Information Centre
- .34 Pameran Pariwisata meliputi: Pekan Pariwisata dan PATA
- .35 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
- .36 Bimas Pariwisata
- .4 Perjalanan wisata
 - .41 Biro perjalanan
 - .42 Angkutan wisata
 - .43 Travel Service
 - .44 Souvenir
 - .45 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- .5 Pramuwisata meliputi : Pramuwisata Madya,
Pramuwisata Muda,
pramuwisata Khusus
- .6 Fasilitas wisatawan
 - .61 Hotel/Motel
 - .611 Status Hotel
 - .612 Kelas Hotel
 - .613 Tarif
 - .62 Losmen/Penginapan
 - .63 Penginapan Remaja
 - .64 Pondok Wisata
 - .65 Perkemahan
 - .66 Restoran, Bar, dan Diskotek
 - .67 Rumah Makan

- .7 Asosiasi Profesi Kepariwisataan
 - .71 PHRI
 - .72 PUTRI
 - .73 ASITA
 - .74 HPI
 - .75 HPP
- .8 Tempat Rekreasi
 - .81 Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - .82 Ciptaan Tuhan
 - .83 Hasil Karya Manusia
 - .84 Rehabilitasi/Perawatan
 - .85 Pengembangan Fasilitas
 - .86 Tanah/Bangunan
 - .87 Bina Usaha

557 Meteorologi

- .1 Curah hujan
- .2 Hujan buatan
- .3 Kemarau Panjang
- .4 Peneropongan bintang
- .5 Ramalan Cuaca

560 TENAGA KERJA

- .1 Pengangguran

- .11 Data Permintaan TKI/TKW dari Luar Negeri
 - .12 Data Permintaan TKI/TKW dari Daerah
 - .2 Job order TKI Keluar Negeri oleh PJTKI
 - .3 Rekrutmen Calon TKI/TKW
 - .4 Seleksi Naker ke Luar Negeri
 - .41 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
 - .42 Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
 - .43 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
 - .5 Persyaratan Naker
 - .51 Permohonan Rekomendasi Naker
 - .52 Perjanjian Kerja TKI/TKW
 - .53 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
 - .54 Permohonan Fisikal ke Luar Negeri
 - .55 Pelatihan TKI/TKW
 - .6 Pemberangkatan Naker
 - .61 Pemberangkatan ke Luar Negeri
 - .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
 - .63 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
 - .7 Pemulangan Naker
 - .71 Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
 - .72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
 - .73 TKI/TKW terkena Kasus Pidana
- 561 Upah

- .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional
 - .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk Upah Lembur)
 - .5 Laporan Data Remintanse
 - .6 Pembayaran Gaji.Upah TKI/TKW
- 562 Penempatan Tenaga Kerja/TKI
- .1 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
 - .2 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional.
 - .3 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
- 563 Latihan Kerja
- .1 Pendidikan Latihan Kerja
 - .11 Diklat Didalam Negeri (PKL, Pra Kerja, OJT)
 - .12 Diklat DiLuar Negeri (Pemagangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .22 Instruktur/Pelatihan
 - .23 Modul/silabus dan Bahan Praktek
 - .24 Kurikulum dan metode Pengajaran
 - .25 Sertifikat
 - .3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
- .1 Butsi

.2 Padat Kerja

565 Perselisihan perburuhan

- .1 Pengaduan Perkara Perburuhan/Naker
- .2 Pemeriksaan Perkara Perburuhan/Naker
- .3 Penyelidikan dan penyidikan Perkara Perburuhan/Naker
- .4 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan/Naker
- .5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan
Perburuhan/Naker
- .6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang
- .7 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K
- .8 Daftar Usula, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K
- .9 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja

566 Keselamatan kerja

- .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- .3 Keterangan kelayakan atau pelindung diri (APD) dalam bekerja
- .4 Pengangkatan dan pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- .5 Pelatihan Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes.
- .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha

567 Pemutusan Hubungan Kerja

- .1 Pengaduan PHK sepihak
- .2 PHK Masal

- .3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK
- .4 Ijin Melakukan PHK
- .5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK
- .6 Pemberian Uang Tunggu bagi pekerja yang di PHK
- .7 Pemberian Uang Pesangon bagi pekerja yang di PHK

568 Kesejahteraan Buruh

- .1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja bagi Naker
- .11 Pemilihan Pekerja Teladan
- .2 Perumahan Pekerja
- .3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
- .4 Koperasi Pekerja
- .5 Sarana Transportasi Pekerja
- .6 Perpustakaan Pekerja
- .7 Tempat Ibadah Pekerja
- .8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- .9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- .91 Lembaga Kerjasama Bipartid

569 Tenaga kerja orang asing

- .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- .4 Perjanjian Kerja dengan Negara Asing
- .5 Data Tenaga Kerja Asing
- .6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing

- .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 **PERMODALAN**

571 Modal Domestik

- .1 Kerjasama Penanaman Modal antar Provinsi
- .2 Kerjasama Penanaman Modal antar Kabupaten

572 Modal Asing

573 Modal Patungan (Join Venture)/Penyertaan Modal

574 Pasar Uang dan Modal

575 Saham

580 **PERBANKAN/MONETER**

581 Kredit

582 Invenstasi

583 Tabungan

- .1 Deposito
- .2 Tabanas
- .3 Rekening
- .4 Hadiah Tabungan
- .5 Taska
- .6 Tapelpram

584 Lembaga Perbankan

- .1 Bank Pemerintahan
 - .2 Bank Pembangunan Daerah
 - .3 BKPD/LPK
 - .4 Bank Swasta
 - .5 Bank Syariah
- 585 Asuransi
- .1 Polis
 - .2 Premi
 - .3 Tertanggung/Pemegang Polis
 - .4 Uang Pertanggungan
 - .5 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel dan Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara/Obligasi
- 589 Moneter/Transaksi Moneter lainnya
- 590 **AGRARIA**
- 591 Tata GunaTanah
- .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 Penyediaan Data, Peta, dan Publikasi
 - .4 Fakta Tata Guna Tanah
 - .5 Tanah Kritis

- .6 Inventaris tanah
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan Tanah Pertanian
 - .12 Penentuan Tanah Objek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Objek Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan

- .7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .1 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
 - .11 Sewa Tanah
 - .111 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung-Gedung Negeri
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
 - .45 Kehutanan
 - .5 Hak Guna Bangunan

- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
- .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
- .54 Badan Hukum Asing Belanda — PRK No. 5/65
- .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
- .6 Hak Pengelolaan
 - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
 - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa Tanah
 - .71 Peradilan Perkara Tanah (Lihat Juga 183)
- .8 Pencabutan Dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran/Pemetaan
 - .11 Fotografi/Fotogrametri
 - .12 Teristris
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria Nomor 61/1965)
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

595 Tanah Untuk Transmigrasi

- .1 Tata Guna Tanah
- .2 Landreform
- .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
- .4 Pendaftaran Tanah

596 Tanah Aset Pemda

- .1 Inventaris Tanah
- .2 Pengadaan Tanah
- .3 Pengamanan, pemagararan penentuan Batas
- .4 Ruislag Tanah
- .5 Penjualan Tanah
- .6 Penghapusan Aset Tanah

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

601 Tata Bangunan, Konstruksi dan Industri Konstruksi

602 Kontraktor, Pemborong

- .1 Tender
- .2 Penunjukan
 - .21 Penunjukan langsung
- .3 Prakualifikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
 - .32 Tanda Daftar Rekanan (TDR)

602 Arsitektur

604 Bahan Bangunan

- .1 Tanah dan batu

Seperti :Batu belah, Steen Slaag, Split, dan sebagainya pasir,

koral, lempung, kapur, marmer

- .2 Aspal, Aspal buatan, Aspal Alam (Butas)
- .3 Besi dan logam lainnya
 - .31 Besi beton
 - .32 Besi profil (Konstruksi)
 - .33 Baja
 - .34 Paku
 - .35 Aluminium, Profil
- .4 Bahan-bahan pelindung dan pengawet
(Cat, Tech Oil, Pengawet kayu)
- .5 Semen
- .6 Kayu Seperti : Balok, Papan, Dolken, Plywood, Gabus, dsb.
- .7 Bahan penutup atap
(Genting, Asbes gelombang, seng, dan sebagainya)
- .8 Alat-alat penggantung dan pengunci
- .9 Bahan-bahan bangunan lainnya

605 Instalasi

- .1 Instalasi bangunan
- .2 Instalasi listrik
- .3 Instalasi air sanitasi
- .4 Instalasi pengatur udara
- .5 Instalasi Akustik

.6 Instalasi Cahaya/Penerangan

606 Konstruksi Pencegahan

.1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran

.2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa

.3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin/Udara/Panas

.4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan

.5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Eksplosive
(Ledakan)

.6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga

.7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom

610 PENGAIRAN

611 Irigasi

.1 Bangunan Waduk

.11 Bendungan

.12 Tanggul

.13 Pelimpahan Banjir

.14 Menara Pengambilan

.2 Bangunan Pengambilan

.21 Bendungan

.22 Bendungan Dengan Pintu Bilas

.23 Bendungan Dengan Pompa

.24 Pengambilan Bebas

.25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa

.26 Sumur Dengan Pompa

- .27 Kantung Lumpur
- .28 Silt Ekstraktor
- .29 Escape Channel
- .3 Bangunan Pembawa
 - .31 Saluran
 - .311 Saluran Induk
 - .312 Saluran Sekunder
 - .313 Suplesi
 - .314 Tersier
 - .315 Saluran Kwarter
 - .316 Saluran Pasangan
 - .317 Saluran Tertutup/Terowongan
 - .32 Bangunan
 - .321 Bangunan Bagi
 - .322 Bangunan Bagi dan Sadap
 - .323 Bangunan Sadap
 - .324 Bangunan Check
 - .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpahan Samping

- .4 Bangunan Pembuang
 - .41 Saluran
 - .411 Saluran Pembuang Induk
 - .412 Saluran Pembuang Sekunder
 - .413 Saluran Pembuang Tersier
 - .42 Bangunan
 - .421 Bangunan Outlet
 - .422 Bangunan Terjun
 - .423 Bangunan Penahan Banjir
 - .43 Gorong-Gorong Pembuang
 - .44 Talang Pembuang
 - .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
 - .51 Jalan
 - .511 Jalan Inspeksi
 - .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
 - .52 Jembatan
 - .521 Jembatan Inspeksi
 - .522 Jembatan Hewan
 - .53 Tangga Cuci
 - .54 Kubangan Kerbau
 - .55 Waduk Lapangan
 - .56 Bangunan Penunjang
 - .57 Jaringan Telepon

- .58 Stasiun Argo
- .59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
- 612 Folder
 - .1 Tanggul Keliling
 - .11 Tanggul
 - .12 Bangunan Penutup Sungai
 - .13 Jembatan
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Muka
 - .212 Saluran Pembawa Induk
 - .213 Saluran Pembawa Sekunder
 - .214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
 - .22 Bangunan Bagi
 - .221 Gorong-Gorong
 - .222 Syphon
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .31 Stasiun Pompa Pembuangan
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuangan Induk
 - .322 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .33 Pintu Air Pembuangan
 - .34 Gorong-Gorong Pembuangan
 - .35 Syphon Pembuangan

- .4 Bangunan Lainnya
 - .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 - .42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpan Air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuangan Induk
 - .212 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Pasang

- .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
- .1 Bangunan Pengaman
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 Check Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Corepure
 - .3 Bangunan Lainnya

- .31 Warning System
- .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Air
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .4 Bangunan Lainnya
- 620 **JALAN**
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara

.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong-gorong (<i>culvert</i>)
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pemasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan

.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-patok KM
.95	Patok-patok ROW (sempadan)
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek

.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan (Pavement)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-gorong (<i>culvert</i>)
.53	Sub Drainage
.54	Buku Trotoir
.55	Tanah
.56	Perkerasan
.6	Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman

- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
- .91 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-patok KM
- .95 Patok-patok ROW (sempadan)
- .96 Rel Pengaman
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong

630 **JEMBATAN**

- 631 Jembatan pada Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara

- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 GudangProyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (*Eart Work*)
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Piloon
 - .54 Landasan
- .6 Bangunan
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Perkerasan
 - .64 Jalan Orang (trotoar)
 - .65 Sandaran

- .66 Talang Air
- .7 Bangunan/Pengaman
 - .71 Turap/Penahan
 - .72 Bronjong
 - .73 Strek Dam
 - .74 Kist Dam
 - .75 Corepure
 - .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
 - .81 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
 - .82 Lampu Penerangan
 - .83 Lampu Pengatur Lalu lintas
 - .84 Patok Pengaman
 - .85 Patok ROW (sempadan)
 - .86 Pagar
- .9 Oprit
 - .91 Badan
 - .92 Perkerasan
 - .93 Drainage
 - .94 Baku
 - .95 Median
- 632 Jembatan pada Jalan Luar Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah

- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Pilon
 - .54 Landasan
- .6 Bangunan
 - .61 Gelagar

.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (trotoar)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Bronjong
.73	Strek Dam
.74	Kist Dam
.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (sempadan)
.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku

.95 Median

640 **BANGUNAN**

641 Bangunan Pemerintah

- .1 Gedung Pengadilan
- .2 Rumah Pejabat Negara
- .3 Gedung DPR
- .4 Gedung Balai Kota
- .5 Penjara
- .6 Perkantoran

642 Bangunan Pendidikan

- .1 Taman Kanak-kanak
- .2 SD dan Sekolah Menengah
- .3 Perguruan Tinggi

643 Bangunan Rekreasi

- .1 Bangunan Olah Raga
- .2 Gedung Kesenian
- .3 Gedung Pemancar

644 Bangunan Perdagangan

- .1 Pusat Perbelanjaan
- .2 Gedung Perdagangan
- .3 Bank
- .4 Perkantoran

645 Bangunan Pelayanan Hukum

- .1 Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
- .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
- .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
 - .4 Bapertarum

649 Elemen Bangunan

- .1 Pondasi
 - .11 Di atas Tiang
- .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
- .3 Atap
 - .31 Atap Genting
 - .32 Atap Asbes
 - .33 Atap Seng
- .4 Lantai/Langit-langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solit
- .5 Pintu/Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorong
 - .54 Pintu Kayu
 - .55 Jendela Kayu
 - .56 Jendela Sorong
 - .57 Jendela Vertikal

650 **TATA KOTA**

- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan

- .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
- .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (Site & Service)
 - .1 Kepadatan Rendah (Low Density)
 - .2 Kepadatan Tinggi (High Density)
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi (Open Green Space)
 - .1 Taman Kota (Public Garden)
 - .2 Ruang Olahraga dan Taman Bermain (Sport and Playing Field)
 - .3 Ruang Terbuka Hijau (Open Green Space)
- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instalasi Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaringan

- .212 Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah
- .213 Bangunan Pengendap
- .214 Bangunan Pengering Lumpur
- .22 Unit Desinfektan
- .23 Unit Pemompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri/Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 660 **TATA LINGKUNGAN**
 - .1 Persampahan
 - .2 Lingkungan Hidup
 - .3 Kebersihan Lingkungan
 - .4 Pencemaran
 - .41 Pencemaran Air
 - .42 Pencemaran Udara
 - .5 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 661 Daerah Hutan

662 Daerah Pertanian/Perkebunan

663 Daerah Pemukiman

664 Pusat Pertumbuhan

665 Transportasi

.1 Jaringan Jalan.

.2 Jaringan Kereta Api

.3 Jaringan Sungai

670 **KETENAGAAN**

671 Listrik

.1 Kelistrikan

.11 Kelistrikan PLN

.12 Kelistrikan Non PLN

.2 Pembangkit Tenaga Listrik

.21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air

.22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

.23 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas

.24 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari

.25 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

.26 PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

.27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap

.3 Transmisi Tenaga Listrik

.31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo

.32 Saluran Udara Tegangan Tinggi

- .33 Kabel Bawah Tanah
- .34 Kabel Bawah Laut
- .4 Distribusi Tenaga Listrik
 - .41 Gardu Distribusi
 - .42 Tegangan Rendah
 - .43 Tegangan Menengah
 - .44 Tegangan Tinggi
 - .45 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Penguasaan Listrik
 - .51 Sambungan Listrik
 - .52 Penjualan Tenaga Listrik
 - .53 Tarif Listrik
 - .54 Instalatur Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya

- 680 **PERALATAN**
- 681 ---

690 **AIR MINUM**

691 Intake

- .1 Broncaptering
- .2 Sumur
 - .21 Sumur Pompa
 - .22 Sumur Artesis
- .3 Bendungan
- .4 Saringan (Screen), Air Bersih
- .5 Pintu Air
- .6 Saluran Pembawa
- .7 Alat Ukur
- .8 Perpompaan
- .9 Tata Guna Air

692 Transmisi Air Beku

- .1 Perpipaian
- .2 Katup Udara (Air Relief)
- .3 Katup Pelepas (Blow Off)
- .4 Bak Pelepas Tekanan
- .5 Jembatan Pipa
- .6 Syphon

693 Instalasi Pengelolaan

- .1 Bangunan Ukur
- .2 Bangunan Aerasi
- .3 Bangunan Pengendapan

- .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
- .5 Bangunan Pengaduk
- .6 Bangunan Saringan
- .7 Perpompaan
- .8 Clear Hell

694 Distribusi

- .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
 - .11 Menara
 - .12 Reservoir di Bawah Tanah
- .2 Perpipaan
- .3 Perpompaan
- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
 - .61 Hydran Umum
 - .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
 - .71 Katup Udara (Air Relief)
 - .72 Katup Penguras (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)

700 PENGAWASAN

700 **PENGAWASAN**

701 Bidang Urusan Dalam (meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor)

702 Bidang Peralatan

703 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan

704 Bidang Kekayaan Daerah

705 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

706 Bidang Perencanaan

707 Bidang Penelitian

708 Bidang Konferensi/Rapat Dinas

709 Bidang Perjalanan Dinas

710 **BIDANG PEMERINTAHAN**

711 Bidang Pemerintahan Pusat

712 Bidang Pemerintahan Provinsi

713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota

714 Bidang Pemerintahan Desa

715 Bidang MPR/DPR

716 Bidang DPRD Provinsi

717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota

718 Bidang Hukum/Konstitusi/Peraturan Lainnya

719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 **BIDANG POLITIK**

Tambahkan Perincian 200 pada 720

721 Bidang Kepartaian

- .1 Keanggotaan
- .2 Pendirian/Pembubaran
- .3 Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai
- .4 Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai
- .5 Pengawasan Pendanaan Partai

722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan

723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional

724 Bidang Organisasi Pemuda

725 Bidang Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan

726 Bidang Organisasi Wanita

727 Bidang Pemilihan Umum

- .1 Pemilu Legislatif dan DPD
- .2 Pemilu Eksekutif/Presiden

730 **BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**

Tambahkan perincian 300 pada 730

731 Bidang Pertahanan

732 Bidang Kemiliteran

733 Bidang Perlindungan Masyarakat

734 Bidang Keamanan

735 Bidang Kejahatan

- .1 Pembunuhan
 - .2 Penganiyaan/Perampokan/Pencurian
 - .3 Pemalsuan
 - .4 Tindakan Asusila/Pelecehan Seksual
 - .5 Pengawasan Penyimpangan Pejabat (PNS)
 - .6 Korupsi/Penyalahgunaan Jabatan Struktural (lihat 356)
- 736 Bidang Bencana
- .1 Pengawasan SAR/Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 Pengawasan Keamanan Aparat/Pejabat
- 739 Pengawasan Lingkungan Hidup
- 740 **BIDANG KESRA**
- Tambahkan perincian 400 pada 740
- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- .1 Kesejahteraan Guru
 - .2 Fasilitas/Sarana
 - .3 Mutu Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- .1 Kebudayaan Daerah/Nasional
 - .2 Kebudayaan Asing
- 744 Bidang Kesehatan/Makanan/Obat
- 745 Bidang Agama (Sara)

- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan (Migrasi/Urbanisasi)
- 748 Bidang Media Massa/Kehumasan
- 749 Bidang Pemberdayaan Perempuan

750 **BIDANG PEREKONOMIAN**

Tambahkan perincian 500 pada 750

- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan/Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan/Moneter
- 759 Bidang Agraria/BPN

760 **BIDANG PEKERJAAN UMUM**

Tambahkan perincian 600 pada 760

- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota

766 Bidang Lingkungan

767 Bidang Ketenagaan

768 Bidang Peralatan

769 Bidang Air Minum

770 **BIDANG PENGAWASAN (PEJABAT PUBLIK)**

Tambahkan perincian 700 pada 770

771 Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota

772 Serah terima Jabatan Publik

773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat

774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota

776 Penolakan LPJ

778 Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara

779 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

780 **BIDANG KEPEGAWAIAN**

Tambahkan perincian 800 pada 780

781 Bidang Pengadaan Pegawai

782 Bidang Mutasi Pegawai

783 Bidang Kedudukan Pegawai

784 Bidang Kesejahteraan Pegawai

785 Bidang Cuti

786 Bidang Penilaian dan Disiplin Pegawai

787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian

788 Bidang Pemberhentian Pegawai

789 Bidang Pendidikan Pegawai

790 **BIDANG KEUANGAN**

Tambahkan perincian 900 pada 790

791 Bidang Anggaran

792 Bidang Otorisasi

793 Bidang Verifikasi

794 Bidang Pembukuan

795 Bidang Perbendaharaan

796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan

797 Bidang Pendapatan/Penerimaan Pajak

798 Bidang Keuangan Pendidikan PNS

799 Bidang Bendahara

800 KEPEGAWAIAN

800 **KEPEGAWAIAN**

Klasifikasi di sini : Kebijakanaksanaan Kepegawaian

.01 Perencanaan

.02 Penelitian

.03 Pembinaan

.04 Pengaduan

.05 Team

- .06 Seminar
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-undangan
- 801 Pemberian Tali Asih
- 802 Arsip Kepegawaian
- 803 Formasi, Pengadaan dan Pendayagunaan
 - .1 Perencanaan dan Penyusunan Formasi Pegawai
 - .2 Penetapan Formasi Pegawai
 - .3 Persyaratan Administrasi untuk diterima sebagai pegawai
 - .4 Pendaftaran Pegawai
 - .5 Data Pegawai
 - .6 Status Pegawai
 - .61 PNS Daerah
 - .62 PNS Pusat yang diperbantukan
 - .63 Pegawai PD/BUMN
 - .64 Penempatan Sementara
 - .65 Wajib Kerja (Ikatan Dinas, Bea Siswa)
 - .66 Pekerja Kontrak
 - .7 Perubahan Status Pegawai
 - .71 Dari PNS Pusat ke Daerah atau Sebaliknya
 - .72 Dari TNI/POLRI ke PNS
 - .73 Dari PNS ke Pegawai Perusahaan atau Sebaliknya
- 804 ---

810 **PENGADAAN**

811 Lamaran

- .1 Testing
- .2 Screening
- .3 Panggilan
- .4 Penelitian Dokumen
- .5 Wawancara
- .6 Training

812 Pengujian Kesehatan

813 Pengangkatan Calon Pegawai

- .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
- .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
- .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
- .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
- .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
- .6 Pengangkatan Calon Tenaga Inpres Kesehatan

814 Pengangkatan Tenaga Lepas

- .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
- .2 Pengangkatan Tenaga Harian
- .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan

815 Pengangkatan Tenaga Asing

816 ---

820 **MUTASI**

Meliputi Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan. Detasering, Tugas Belajar, Wajib Militer

- .1 Golongan I
- .2 Golongan II
- .3 Golongan III
- .4 Golongan IV
- .5 Fungsional

821 Pengangkatan

- .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri (Tetap)
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .15 Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
- .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/lrjen/Kaban
 - .22 Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/
Sekretaris Kepala Dinas/Asisten Sekda
 - .23 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu

- .24 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati
 - .27 Camat
 - .28 Lurah Administratif (Lurah Desa lihat 141)
 - .29 Jabatan lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - .5 Lolos butuh
- 825 Detasering dan Penempatan Kembali

- .1 Penempatan Pegawai pada Unit Kerja
 - .2 Detasering Pegawai
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
 - .5 Ijin Belajar
 - .6 Bea Siswa
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi lain
- 830 **KEDUDUKAN**
- Meliputi Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan ijazah/Penyesuaian Ijazah
- 834 Jenjang Pangkat/ Esselonering

840 **KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Meliputi Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi/Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi, dan Dispensasi

841 Tunjangan

- .1 Jabatan
- .2 Kehormatan
- .3 Kematian/Uang Duka
- .4 Tunjangan Hari Raya
- .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
- .6 Keluarga
- .7 Sandang, Papan, Pangan (Bapertarum), Uang Makan
- .8 Uang Insentif
- .9 Honorarium/Uang Lelah

842 Dana

- .1 Taspen
- .2 Kesehatan
 - .21 Askes
 - .22 Restitusi
 - .23 Bantuan Perawatan
 - .24 Sumbangan Kematian
- .3 Asuransi

843 Perawatan Kesehatan

- .1 Poliklinik
- .2 Perawatan Dokter

- .3 Obat-obatan
- .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi lainnya
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 849 Rekomendasi

- 850 **CUTI**

Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain.
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil

- 855 Cuti Naik Haji
- 856 Cuti di Luar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting

860 **PENILAIAN**

Meliputi Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi, dan Rehabilitasi

861 Penghargaan

- .1 Bintang/Satya Lencana
- .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- .3 Kenaikan Gaji Istimewa
- .4 Hadiah berupa uang
- .5 Pegawai Teladan

862 Hukuman

- .1 Teguran/Peringatan
- .2 Penundaan Kenaikan Gaji
- .3 Penurunan Pangkat
- .4 Pemindahan

Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat lihat 887 dan 888

- .5 Penurunan Jabatan
- .6 Larangan Rangkap Jabatan

863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai

- .1 Pelanggaran Pegawai karena Mengikuti Organisasi Lain

864 Ujian Dinas

- .1 Tingkat I
- .2 Tingkat II
- .3 Tingkat III

865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri

Meliputi Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)

866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali

867 Baperjakat

870 **TATA USAHA KEPEGAWAIAN**

Meliputi Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan, Hak, Penggajian, Sumpah/Janji, dan Korps Pegawai

871 Formasi

972 Bezetting

873 Registrasi/Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

- .1 NIP
- .2 Karpeg
- .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian
- .5 Karsu/Karis

874 Daftar Riwayat Pekerjaan

- .1 Tanggal Lahir
- .2 Penggantian Nama

- .3 Kepartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
 - .2 Kenaikan/Penurunan Gaji
 - .3 Gaji Bersifat Khusus (Anggota DPRD)
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai

880 **PEMBERHENTIAN**

Meliputi Pemberhentian-Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu, Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

- 881 Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III

- .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
- .5 Pensiun Janda/Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas (Tewas)
 - .2 Karena Meninggal Biasa
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat

- 890 **PENDIDIKAN PEGAWAI**

Meliputi Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas dan Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan Reguler/Kader
 - .1 IIP/IPDN/PIN/STPDN

- .2 Universitas (Perguruan Tinggi)
- .3 Akademi
- .31 Agraris
- .4 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan Non Reguler
- 894 Pendidikan ke Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Kuliah Lapangan, Anjangsana, Studi Banding, Widyawisata, KKN
 - .5 Kurikulum
 - .6 Tanya Jawab
 - .7 Karya Tulis
 - .8 Penugasan
 - .9 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara
 - .1 Usul menjadi Tenaga Pengajar
 - .2 Permintaan Tenaga Pengajar
 - .3 Penambahan Tenaga Pengajar
 - .4 Permintaan Tenaga Lainnya

897 Administrasi Pendidikan

- .1 Tahun Pelajaran
- .2 Persyaratan meliputi Pendaftaran, Testing, Ujian
- .3 STTP
- .4 Penilaian Angka Kredit
- .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan

898 Fasilitas Belajar

- .1 Tunjangan Belajar
- .2 Asrama
- .3 Uang Makan
- .4 Uang Transport
- .5 Uang Buku
- .6 Uang Ujian
- .7 Uang Semester/Uang Kuliah
- .8 Uang Saku

899 Sarana

- .1 Bantuan Sarana Belajar
- .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
- .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900 KEUANGAN

900 **KEUANGAN**

901 Nota keuangan

- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 Dana Alokasi Umum (DAU)
- 905 Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 907 Dana Bos
- 908 Tunjangan Daerah

- 910 **ANGGARAN**
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
 - .2 Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)
 - .3 Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)
- 915 Daftar Isian Proyek (DIP)
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
 - .2 Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)
 - .3 Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA)
 - .4 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi Anggaran
- 917 RASK
- 918 DASK Dokumen
- 919 Pengelolaan Anggaran

- .1 Pembuatan Cash Budget.Cash Flow terhadap Posisi Kas
- .2 Realisasi Penerimaan/Pendapatan
- .3 Realisasi pengeluaran
- .4 Realisasi Belanja
- .5 Monitoring Pelaksanaan Anggaran

920 **OTORISASI/SKO**

921 Rutin

922 Pembangunan

923 SIAP

- .1 SIAPDA

924 SKO

- .1 Ralat SKO

930 **VERIFIKASI**

931 SPM Rutin (Daftar P-8)

932 SPM Pembangunan (Daftar P-8)

933 Penerimaan (Daftar P-6 dan P-7)

934 SPJ Rutin

935 SPJ Pembangunan

936 Nota Pemeriksaan

937 SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)

938 Verifikasi Anggaran

- .1 Verifikasi Pengguna Anggaran

- .2 Verifikasi Dokumen Pendukung SPJ
- .3 Verifikasi Saldo Kas dan Bank
- .4 Verifikasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan

939 ---

940 **PEMBUKUAN**

- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran
- 943 Permintaan Laporan Fisik Hasil Pembangunan
- 944 Pembukuan Kas Umum
- 945 Pengendalian Kas dan Bank
 - .1 Pengendalian Kas
 - .2 Pengendalian Bank
 - .3 Konfirmasi Berkaitan dengan pengendalian Kas dan Bank
 - .31 Rekening Bank
 - .32 Rekening Koran
 - .33 Buku Bank

946 ---

950 **PERBENDAHARAAN**

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara

- 954 Pengangkatan/Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 -
- 958 -
- 959 -

- 960 **PEMBINAAN KEBENDAHARAAN**
- 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 Teguran Terhadap Bendaharawan
 - .1 Sanksi
- 965 ---

- 970 **PENDAPATAN**
- 971 Perimbangan Keuangan
 - .1 Bagi Hasil Pajak
 - .11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - .12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
 - .13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)

- .2 Bagi Hasil Bukan Pajak
 - .21 Pemberian Hak atas tanah Pemerintah
 - .22 Provisi Sumber Daya Hutan
 - .23 Sumber Daya Alam/Migas
 - .24 Iuran Eksplorasi/Landrent
- .3 Pajak Langsung
 - .31 Pemungutan Pajak Langsung
 - .32 Bagi Hasil Pajak Langsung
 - .33 Informasi mengenai pajak langsung
 - .34 Pelayanan Masyarakat untuk mempermudah pemungutan Pajak Langsung
 - .35 Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak langsung.
- .4 Pajak Tidak Langsung
 - .41 Pemungutan Pajak Tidak Langsung
 - .42 Bagi Hasil Pajak Tidak Langsung
 - .43 Informasi mengenai pajak tidak langsung
 - .44 Pelayanan Masyarakat untuk mempermudah pemungutan Pajak Tidak Langsung
 - .45 Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak tidak langsung.
- 972 Subsidi
- 973 Pajak, IPEDA, IHH, IHPH
 - .1 Pajak kendaraan bermotor
 - .2 Pajak Kendaraan diatas air

- .3 Bea balik nama kendaraan bermotor
- .4 Bea balik nama kendaraan diatas air
- 974 Retribusi
 - .1 Retribusi pelayanan kesehatan
 - .2 Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - .3 Retribusi tempat pelelangan ikan
 - .4 Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - .5 Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - .6 Retribusi Hasil Hutan
 - .61 Pengendalian kayu lintas kabupaten/kota
 - .62 Ijin pemanfaatan flora dan fauna
 - .63 Tempat pelelangan hasil hutan
 - .7 Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
 - .8 Retribusi bidang Metrologi
 - .9 Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan
- 978 Bantuan
 - .1 Bantuan Presiden
 - .2 Bantuan Menteri
 - .3 Bantuan Gubernur
 - .4 Bantuan Bupati/Walikota
 - .5 Bantuan Lainnya

- 979 Pendapatan Lainnya
 - .1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - .11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - .12 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
 - .13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - .14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - .15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - .2 Penerimaan Jasa Giro
 - .21 Jasa Giro Kas Daerah
 - .22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - .23 Jasa Giro Khusus
 - .3 Penerimaan Bunga Bank
 - .31 Bunga Deposito
 - .32 Bunga Tabungan
 - .4 Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
 - .5 Penerimaan Lainnya
 - .51 Penerimaan Laba BUMN
 - .52 Penerimaan Dari Pemerintah Pusat
 - .53 Penerimaan dan Pengembalian dari Potongan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 980 **KEUANGAN PENDIDIKAN PEGAWAI**
- 990 **BENDAHARAWAN**
- 991 SKPP/SPP

992 Teguran SPJ

993 ---

994 ---

995 ---

999 **KODE PEMBANTU**

Kode Pembantu dibawah ini tidak bisa dipakai sendiri, tetapi dapat dipakai sebagai pelengkap dari yang mana pun, dengan menambahkannya dibelakang tiap kode.

Contoh : Seminar Penerbitan : 481.06

Statistik Produksi Padi : 521.110.7

Survey Kehutanan : 526.021

- 01 PERENCANAAN

- 02 PENELITIAN

- 03 PENDIDIKAN

- 04 LAPORAN

- 05 TIM, PANITIA

- 06 SEMINAR

- 07 STATISTIK

- 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 09 ---

- 01 Perencanaan

- 02 Penelitian

- 021 Survey

- 022 Riset

- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 041 Sewaktu-waktu
- 042 Monografi
- 043 Pengaduan
- 05 Panitia, Tim, Dewan, Badan
- 06 Seminar, Workshop, Lokakarya, Rake, Kongres
- 07 Statistik
- 071 Sensus, Cacah Jiwa
- 08 Peraturan Perundang-undangan
- 09 ---

KODE WILAYAH

- 1 **PUSAT**
- 11 Nanggroe Aceh Darussalam
- 12 Sumatera Utara
- 13 Sumatera Barat
- 14 Riau
- 15 Jambi
- 16 Sumatera Selatan
- 17 Bengkulu
- 18 Lampung
- 19 Kepulauan Bangka Belitung

- 21 Kepulauan Riau
- 31 DKI Jakarta
- 32 Jawa Barat
- 33 Jawa Tengah
- 34 Daerah Istimewa Yogyakarta
- 35 Jawa Timur
- 36 Banten
- 51 Bali
- 52 Nusa Tenggara Barat
- 53 Nusa Tenggara Timur
- 61 Kalimantan Barat
- 62 Kalimantan Tengah
- 63 Kalimantan Selatan
- 64 Kalimantan Timur
- 71 Sulawesi Utara
- 72 Sulawesi Tengah
- 73 Sulawesi Selatan
- 74 Sulawesi Tenggara
- 75 Gorontalo
- 76 Sulawesi Barat
- 81 Maluku
- 82 Maluku Utara
- 91 Papua
- 92 Irian Jaya Barat

INDEKS KAITAN (RELATIVE INDEX)

A

Aceh	Kw-21
Administratif	
Desa	145
Pendidikan pegawai	897
Sekolah	422
Adopsi	474.11
Agama	450
Budha	455
Hindu	454
Islam	451
Khatolik	453
Protestan	452
Air buangan industri	658.31
Air minum	690
Air tanah	616
Akademi	421.3
Agraria	892.21
Pemerintah Dalam Negeri	892.22
Akuisisi Arsip	045.10
Akseptor KB	476.5

Alamat kantor, pejabat	019.4
Alat angkutan	
Jalan Raya	551.25
Kantor	024
Laut	552.2
Udara	553.3
Alat medis	447
Alat tulis	021
Aluminium	
Profil Bahan Bangunan	604.34
Tambang	544.2
Amanat	
Menteri Dalam negeri	111.4
Presiden	111.2
Camat	138.1
Amandemen	159.1
Anak nakal	462.1
Anak putus sekolah	463.1
Aneka	
Industri	536
Kerajinan	537
Perusahaan	536
Tambang	545
Tanaman	525.29

Usaha perdagangan	517
Angin topan	363
Anggaran	910
Belanja Tambahan	913
Pembangunan	912
Pendapatan dan Belanja Daerah	903
Pendapatan dan Belanja Negara	902
Rutin	911
Angkatan	
Darat	321.1
Laut	321.2
Udara	321.3
Empat Puluh Lima	221.2
Angkutan	
Danau	551.4
Anjing gila	443.34
Anumerta pengangkatan pegawai	861.2
APBD Lih : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	903
APBN Lih : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	902
APDN Lih : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri	892.22
APPKD	142
Arsip Lih : Kearsipan	045
Arsip Media Baru	045.11
Arsitektur	603

Assainerring	657
Asbes gelombang bahan bangunan	604.7
ASEAN	193.1
Asimilasi	471.3
Assisten Sekwilda	821.22
Aspal	
Bahan bangunan	604.2
Bahan galian	545
Asrama pendidikan pegawai	898.2
Asuransi	585
Atap elemen bangunan	649.3
Audensi	019.3
Auto Rally	421.1
Ayam ras	524.41
Ayam buras	524.42

B

Badan	
Badan jalan	
Jalan Kota	621.3
Jalan Luar Kota	622.3
Badan Pemeriksa Keuangan	116
Badan Hasil Landreform	592.3

Bahan	
Bangunan	604
Galian	545
Peledak	334
Pelindung Bangunan	604.4
Pengawet Bangunan	604.4
Bahasa	434
Bahaya kelaparan	444.1
Baitulmal	451.5
Bak pelepas tekanan	
Transmisi Air Minum	692.4
Distribusi Air Minum	694.8
Baku	
Jembatan Kota	631.94
Jembatan Luar Kota	632.94
Balai Kesehatan / Poliklinik	455.5
BKIA	445.6
Bali	Kw-61
Balok bahan bangunan	604.9
Bandir / umbul-umbul	019.6
Bangunan air minum	
Aerasi	693.2
Pembubuh Bahan Kimia	693.4
Saringan	693.6

Ukur	693.1
Pengendapan	693.3
Pengaduk	693.5
Bangunan air tanah	
Pembawa	616.2
Pembuang	616.3
Bangunan assainerring	657.21
Pengendap	657.213
Pengering Lumpur	657.314
P penghancur Kotoran	657.212
Penyaring	657.211
Bangunan bawah	
Jembatan Kota	631.51
Jembatan Luar Kota	632.51
Bangunan irigasi	
Bagi	611.321
Cek	611.324
Outlet	611.421
Pembawa	611.3
Pembuang	611.4
Penahan Banjir	611.423
Pengambilan	611.2
Penunjang	611.323
Sadap	611.323

Terjun Pembawa	611.325
Terjun Pembuang	611.422
Bangunan	
Industri	647
Keagamaan	654.8
Pemerintahan	641
Pelayanan Umum	645
Pendidikan	642
Penjara	641.5
Bangunan pasang Surut	
Pembawa	613.1
Pembuang	613.2
Penangkis Kotoran	613.331
Pengukur curah hujan	613.333
Pintu Masukan	613.332
Pintu Pembuang	613.22
Saluran Pembuang Sekunder	613.212
Saluran Pembuang Tersier	613.213
Bangunan pelengkap	
Jalan kota	612.9
Jalan luar kota	622.9
Bangunan pengaman	
Jalan kota	621.9
Jalan luar kota	622.9

Pengendalian sungai	624.1
Bahan polder	
Bagi	612.23
Gudang Stasiun Pompa	612.413
Listrik Stasiun Pompa	612.414
Pembawa	612.2
Pembuang	612.3
Pengukur Air	612.411
Pengukur Curah Hujan	612.412
Penutup Sungai	612.12
Bangunan	
Pusat Perbelanjaan	644.1
Rekreasi	643
Tempat Tinggal	648
Waduk Irigasi	611.1
Banjir	362
Bank	
Bangunan Gedung	644.3
Pembangunan Daerah	584.2
Bantuan	978
Bupati	978.4
Gubernur	978.3
Hukum	183.1

Kebakaran Untuk Pegawai	846.1
Kebanjiran Untuk Pegawai	846.2
Lainnya	978.5
Luar Negeri	193.2
Pembangunan Daerah	050.12
Pembangunan Desa	174.24
Presiden	978
Bantuan Pembangunan Desa	147.24
Alokasi	147.25
Pelaksanaan	147.26
Juara Lomba Desa	147.263
Keserasian	147.262
Langsung	147.261
BAPPEDA	050.13
Barak kerja	
Jalan Kota	621.25
Jalan Luar Kota	622.25
Jembatan Kota	631.25
Jembatan Luar Kota	532.25
BATANG	521.412
Batu bela bahan bangunan	604.1
Bassar	466.2
Bea	975
Bea siswa	422.5

Berita Acara Penyerahan Arsip	045.65
Bela sungkawa	004
Bencana	360
Angin topan	363
Banjir	362
Gempa	361
Gunung Berapi	361
Kebakaran	364
Kekeringan	365
Tanah Longsor	362
Benda kuno	432.22
Bendaharawan	990
Penunjukan	954
Bendung	
Pintu bilas irigasi	611.22
Pompa irigasi	611.23
Bendungan	
Air minum	691.3
Irigasi	611.11
Bengkulu	Kw-28
Bensin	541
Penyaluran	541.3
Pompa	541.3
Tengker	541.3

Tangki	541.3
Beras	
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Berburu binatang	522.22
Besi	
Bahan bangunan	604.3
Beton bahan bangunan	604.31
Profi bahan bangunan	604.32
Tambang	544.3
Tua	544.3
Bezetting Pegawai	872
Biara	454.2
Bibit Unggul	524.52
Bimas Tanaman Pangan	521.11
Bimbingan	
Landreform	592.5
Sosial	467
Bina Usaha	521.7
Bintang Tanda Kehormatan	002.1
Bisu	461.4
BKS-AKSI	064
Box Tersier	611.33
Boxit	544.2

BPGD	444.4
Broncaptering Air Minum	691.1
Bronjong	
Jalan Kota	691.99
Jalan luar kota	692.99
Jembatan kota	631.72
Jembatan luar kota	632.72
Buah-buahan	521.232
Bunuh diri	352.1
Budget	159.4
Buku	481.3
Islam	451.47
Pendidikan Pegawai	899.1
Sekolah	425.2
Buruh	560
Busung lapar	444.1
Batas Lh : aspal	
BUTSI	564.1
BUUD	147.231

C

Cabang kesenian	431.1
Cabang olahraga	426.1

Cacad	
Mata	461.1
Mental	461.3
Tubuh	461.2
Veteran	464.3
Cacah jiwa	522.51
Cagar alam	
Camat	821.27
Candi	
Bangunan	464.2
Benda kebudayaan	432.21
Cat bahan bangunan	604.4
Catatan sipil	477
Cek	586
Cek dan sungai	614.17
Cengkeh	525.25
Ceramah	432.2
Pendidikan pegawai	895.2
Cess	977
Clear hell instalasi minum	693.8
Courpure	
Jembatan kota	631.75
Jembatan luar kota	632.75
Cukai	976

Culvert, Lh : gorong-gorong jalan kota

Curah hujan 557.1

Cuti

Pegawai 850

Alasan lain 857

Besar 852

Di Luar tanggungan negara 856

Hamil 854

Naik haji 855

Sakit 853

Tahunan 851

D

Daerah Istimewa Jogjakarta Kw-34

Daerah luar kota

Hutan 661

Pemukiman 663

Daerah luar kota (lanjutan)

Perkebunan 662

Pertanian 662

Daerah penangkapan ikan

Daerah perkotaan

Industri 654

Pelabuhan 651

Pemerintahan	652
Pemukiman	653
Perumahan	651.1
Pusat perbelanjaan	655
Rekreasi	
Daerah samping	
Jalan kota	621.8
Jalan luar kota	622.8
Daftar Pertelahaan Arsip	045.66
Daging ternak	524.13
Daftar Rekanan Mampu (DRM)	602.31
Dakwah	451.48
Dalang	431.1
Damar	522.22
Dana kepegawaian	842
Asuransi	842.3
Kesehatan	842.2
Taspen	842.1
Dana kecelakaan	585
Dana pengukuran	549.2
Danareksa	574
Darmawisata	421.71
Dasar Negara	180.11
Data Anggaran	924

Data inventaris Peralatan Hansip	341.362
Data ternak	524.8
Daun	521.411
Dekan I	424
Demam Berdarah	443.42
Demonstrasi	332
Dengar pendapat	156.2
Dengue Haemorrhagic, Lh : Demam Berdarah	
Departmen	
Dalam Negeri	114
Lainnya	115
Deposito	583
Desa	140
Desentralisasi	118
Detasering	825
Dewan	
Marga	114
Pertimbangan Agung	116
Perwakilan	150
Stabilisasi Ekonomi	500.1
Tingkat desa	114
DharmaTirta	147.164
Dharma Wanita	261
DIK	914

DUK	914.1
DIKDA	914.2
DUKDA	914.3
Dies Natalis	421 .6
Dinas otonom	
Dinding elemen baru	549.2
DIP	915
DUP	915.1
DIPDA	915.2
DUPDA	915.3
Direktur Jabatan	821.22
Direktur Jenderal Jabatan	821.21
Disenfektan Unit Assainerring	657.22
Diskusi metode belajar	423.3
Pendidikan pegawai	859.3
Dispensasi pegawai	848
Distribusi	
Air minum	694
Pangan untuk pegawai	844.1
Sandang untuk pegawai	844.2
Dokumentasi	042
Dokter tenaga medis	446
Dolken bahan bangunan	604.6
Domine	452.3

Dosen	424
Drainage	
Jalan kota	621.5
Jalan luar kota	622.5
Jembatan kota	631.93
Jembatan luar kota	632.93
Duklog perorangan	341.361
Dukun	448.4
Dwifungsi ABRI	321

E

Ekspedisi pengiriman surat	045.1
Ekspor	512
Elemen bangunan	649
Emas	543
Epidemiologi	443.3
Eslope chanel irigasi	611.29
Exit irigasi	185.3

F

Feri	551.5
------	-------

Filaria	443.43
Film	484
Fiscal	587
Fitrah	451.12
Forum, Lh: Muspida	
Fotogrametri	594.11
Formasi pegawai	871
Frambosia	045.81
Fumigasi	045.81

G

Gabah	
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gadai	181.31
Tanah	501
Galian tanah	
Jembatan kota	631.31
Jembatan luar kota	632.31
Gambar Presiden/Wakil Presiden	019.21
Ganti nama	
Pegawai	874.2

Warga negara keturunan asing	471.22
Ganti rugi tanah	
Landreform	592.2
Tanah absentee	592.22
Tanah kelebihan	592.21
Tanah partikelir	592.23
Pencabutan hak	593.83
Garam	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gardu listrik	
Induk	671.31
Distribusi	671.41
Penghubung	671.31
Travo	671.31
Gas bumi	542
GBHN	180.2
Gedung urusan dalam	
kantor	011
Rumah dinas	012
Gedung	
Balai kota	
Bangunan	641.4

Gedung (lanjutan)	
DPR	
Bangunan	641.3
DPRD	
Bangunan	641.3
Kesenian	
Bangunan	643.1
Sarana olah raga	426.21
Parkir	
Bangunan	645.2
Pemancar	
Bangunan	643.3
Pengadilan	
Bangunan	641.1
Perdagangan	
Bangunan	644.2
Sarana pendidikan	425.11
Sekolah Islam	
Sarana pendidikan	451.45
Gelar senja	019.5
Gelagar	
Jembatan kota	631.61
Jembatan luar kota	632.61
Gelanggang remaja	427

Gempa	361
Genteng bahan bangunan	604.7
Geologi	546
Gereja	
Katholik	453.2
Protestan	452.2
Gigi	441.1
Giro	586
Gizi	444
Gelanggang	462.1
Golongan karya	212
Gogo	521.212
Gorong-gorong irigasi	
Pembawa	611.37
Pembuang	611.43
Gorong-gorong jalan kota	621.52
Gorong-gorongjalan luar kota	622.51
Gorong-gorong polder	
Pembawa	612.24
Pembuang	612.34
Got miring irigasi	611.34
Grafika	486
Gudang	516
Gudang proyek	

Jalan kota	621.24
Jalan luar kota	622.24
Jembatan kota	631.24
Jembatan luar kota	632.24
Guest house	013
Gula	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gunung Merapi	
Bencana	361
Pengawasan	546.1
Guru	
Inpres	813.5
Teladan	424

H

Haji	451.14
Hak/Suara/Pendapat	
MPR	154
DPR	159
DPRD Kabupaten/Kota	174
DPRD Provinsi	164

Pengangkatan/pemberhentian pegawai	875
Pengusahaan hutan	522.11
Hak tanah	593
Guna bangunan	593.5
Badan Hukum	593.52
Perorangan	593.51
Guna Usaha	593.4
Milik	693.2
Badan Hukum	593.22
Perorangan	593.21
Pakai	593.32
Badan Hukum	593.31
Perorangan	593.81
Pembebasan	593.81
Pencabutan	593.81
Pengelolaan	593.6
Hama tanaman	521.42
Hama serangga	521.421
Hama tikus dan sejenisnya	521.422
Hama hutan	522.7
Hansip	
Pembinaan Hansip	340
Hasil pemilu	277
Hari	

Besar	003
Ibu	260
Libur Sekolah	422.3
Pahlawan	003.1
Raya	003
Keagamaan	003.2
Nasional	003.1
Ulang Tahun	003.3
Harta Agama Islam	451.5
Hibrida	525.26
Hiburan	435
Hidrologi	547
Himpunan	
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	253
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	254
Hipotik	181.32
Hobby	426.4
Home industri	536.1
Hotel	556.2
Untuk pegawai	845.3
Hortikultura	521.23
Hubungan luar negeri	190
Hubungan masyarakat (Humas)	488
Hukum	180

Hukum Internasional	184
Adat	189
Perdata	181
Pidana	182
Hukuman pegawai	862
Peringatan	862.1
Tegoran	862.1
Huma	521.213
Huru-Hara	332
Hutan	
Hak pengusahaan	522.11
Kelestarian	522.5
Perpetaan	522.13
Tata Guna	522.12
Hidup/Lindung	522.81
Wisata	522.82
Produksi	522.83
Hutang perdata	181.3
Hutang Negara	588
Hydran air minum	694.6
Kebakaran	694.62
Umum	694.61
Hygiene sanitasi	4435

I

Ibu teladan	463.1
Islam (rumah peribadatan)	451.1
IHH	973
Ikatan Bidan Indonesia	231.2
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	231
IHPH	973
Iklan	510.12
Imigrasi	185
Impor	513
Imunisasi	443.32
Industri	530
Aneka	536
Elektronika	532
Farmasi	533
Kimia	533
Logam	531
Makanan	535
Minuman	535
Mesin	532
Tekstil	534
Imunisasi buatan	521.51
Inmas	521.11

Inspektur

Jenderal 821.21

Pembantu 821.23

Instalasi

Air Sanitasi 605.3

Akustik 605.5

Bangunan 605.1

Cahaya 605.6

Listrik 605.2

Rumah Dinas 015

Penerangan 605.6

Pengatur Udara 605.4

Pengelolaan Air Minum 693

Rumah Dinas 011

Instansi vertikal

Provinsi 120.22

Kabupaten 130.22

Kota 130.22

Instruksi

Gubernur 188.54

Lembaga Non Departemen 188.53

Menteri 188.52

Presiden 188.51

Walikota 188.55

Intake air minum	691
Intan	543
Internet	489
Inventaris kantor	028
Investasi	582
Ipeda	973
Irian Jaya	Kw-81
Irigasi	611
Islam	451

J

Jadwal Retensi Arsip (IRA)	045.64
Jalan	620
Kota	621
Luar kota	622
Irigasi	611.51
Inspeksi	611.511
Logistik	611.512
Jalan sementara	
Jalan Kota	621.21
Jalan Luar Kota	622.21
Jembatan Kota	631.22
Jembatan Luar Kota	632.21

Jaksa	187
Jagung	521.222
Jambi	Kw-25
Jamu	448.3
Jam kerja kantor	448.3
Janda	061.2
Pahlawan	464.1
Pensiunan Pegawai	882.5
Perintis Kemerdekaan	464.2
Janji pegawai	877
Jaring terapung	523.36
Jaringan	
Jalan	
Kota	656.1
Luar Kota	665.1
Kereta Api	656.2
Kota	665.2
Luar kota	671.44
Listrik bawah tanah	
Sungai	
Kota	656.3
Luar kota	665.3
Telepon Irigasi	611.57

Jasa Air	014
Jasa Listrik	015
Jasa Telepon	016
Jawa	Kw-3
Barat	Kw32
Tengah	Kw-33
Timur	Kw-35
Jawaban Pemerintah	158
Jembatan	630
Irigasi	611.52
Hewan	611.522
Inspeksi	631.521
Jalan Kota	631
Jalan Luar Kota	632
Pasang Surut	613.35
Pipa Air Minum	692.5
Polder	612.22
Sementara	631.22
Jalan Kota	621.22
Jalan Luar Kota	622.22
Jendela Elemen Bangunan	649.5
Jenjang Pangkat	834
Jumlah	Desa 174.411

K

Kabel listrik bawah tanah	671.33
Kabel listrik bawah Laut/air	671 .34
Kabinet	113
Kacang (tanaman)	521.221
Kadarkum (sadar hukum)	183.2
Kaderisasi Partai	218
Kalimantan	
Barat	Kw-41
Selatan	Kw-43
Tengah	Kw-42
Timur	Kw-44
Kaki lima	511.3
Kampanye	273
Kampos	425.12
Kandang ternak	524.22
Kangker	441.4
Kantong lumpur	
Irigasi	611 .27
Pengendalian Sungai	614.16
Kantor proyek	
Jalan Kota	621.23
Jalan Luar Kota	622.23

Jembatan Kota	631.23
Jembatan Luar Kota	632.23
Kapal	552.2
Nelayan	523.411
Kapur bahan bangunan	604.1
Karantina	443.3
Karantina ternak	524.34
Karet hash perkebunan	525.21
Karpeg, Lh : Kartu pegawai	
Kartu pegawai	873.2
Kartu penduduk	474.4
Karya tulis metode belajar	423.6
Pendidikan Pegawai	895.6
Katup udara	
Distribusi Air Minum	691.71
Transmisi Air Minum	692.2
Katup pelepas	
Distribusi Air Minum	694.72
Distribusi Air Minum	692.3
Kayu	
Bahan Bangunan	604.4
Hasil Hutan	522.21
Industri	536
Perusahaan	536

Keamanan	
Kantor	330
Lalu Lintas	017
Jalan Raya	551.11
Laut	552.11
Keanggotaan	
DPR	155
DPRD Kabupaten/Kota	171
DPRD Provinsi	161
MPR	151
Kearsipan	045
Ekspedisi	045.1
Salah Kirim	045.2
Surat Pengantar	045.4
Kebersihan	
Kantor	018
Kota	658.5
Lingkungan	660.2
Kebakaran	364
Kebijaksanaan Umum Politik	201
Kebudayaan	430
Kebun	521.53
Kebun Binatang	522.53
Kecamatan	138

Kecelakaan	370
Kegaduhan Kota	658
Kegiatan	
Pelajar	421.6
Sekolah	421.7
Remaja	427
Kehutanan	522
Kejahatan	350
Kejaksaan	187
Kekayaan	187
Daerah	030
Desa	143
Kekayaan pribadi pegawai	865
Kekayaan ABRI	324
Kekurangan makan	444.1
Kekeringan	365
Kelahiran	474.1
Kelamin penyakit	443.22
Kelapa	
Sawit	525.26
Hibrida	525.26
Kelaparan	525.26
Kelautan	549
Kelestarian Hutan/Satwa	525.25

Kelompok	
Keluarga berencana	476
Alat Kontrasepsi	476.1
Lestari	476.2
Mandiri	476.3
Penyuluh Lapangan	476.4
Akseptor	476.5
Unik Pegawai	834.4
Kelurahan	140
Kematian	474.3
Kemiliteran	320
Kenaikan Gaji Pegawai	822
Golongan I	822.1
Golongan II	822.2
Golongan III	822.3
Golongan IV	822.4
Kenaikan Pangkat Pegawai	
Golongan I	823.1
Golongan II	823.2
Golongan III	823.3
Golongan IV	823.4
Kenakalan remaja	358
Kendaraan Pemilu	276
Keolahragaan	426

Kepala	
Badan	821.21
Bagian	821.23
Bidang	821.23
Biro	821.22
Dinas	821.22
Seksi	821.24
Sub Bagian	821.24
Sub Bidang	821.24
Sub Direktorat	821.23
Kepartaian	210
Pegawai	874.3
Kepegawaian	800
Kepemudaan	427
Kependudukan	470
Kepenjaraan	186
Kepercayaan	436
Kepolisian	331
Kepurbakalaan	432
Keputusan	188.4
Bupati	188.45
Gubernur	188.44
Lembaga Non Departemen	188.43
Menteri	188.42

Presiden	188.42
Walikota	188.45
Keracunan	444.2
Keracunan makanan	537
Kerajinan	537.1
Kerajinan rakyat	551.6
Kereta api	193
Kerjasama asing	
Kerjasama antar Departemen	
Kerjasama pembangunan desa	119
Luar Negeri	
Perguruan Tinggi	
Kesamudraan	548
Kesehatan	440
Hewan	524.3
Pembinaan	441
Sekolah	441.5
Ibu Dan Anak	441.8
Kesejahteraan	
Anak	463
Anggota DPR	157
Anggota DPRD Kabupaten/Kota	173
Anggota DPRD Provinsi	163
Anggota MPR	153

Buruh	568
Keluarga	463
Hansip	341.63
Pegawai	840
Rakyat	400
Sosial	465
Keselamatan kerja	566
Kesenangan	435
Kesenian	431
Ketela pohon	521.233
Ketenagaan	670
Ketangkasan	466.2
Ketata Laksanaan	065
Ketertiban	300
Ketertiban kantor	017
Keuangan	900
Desa	147.22
Kewarganegaraan Indonesia	471
Kewartawanan	485
Kewarganegaraan mutasi pegawai	875
Kewilayahan desa	146
KIK, Lh : Kredit Investasi Kecil	
Kios	511.3
Kisdam	

Jembatan Kota	631.74
Jembatan Luar Kota	632.74
Klasifikasi Lh : Pola Klasifikasi	045.3
Klep pengatur banjir	614.13
KNIP	241
Kolam pasang surut	613.13
Kolam renang	426.24
Koler	443.31
Komite Nasional Pemuda Indonesia	241

L

Laboratorium lapangan	521 .26
Jalan Kota	521 .26
Jalan Luar Kota	522.26
Jembatan Kota	531.26
Jembatan Luar Kota	532.26
Lahan kritis	521 .54
Lahan	361
Lalu lintas	
Danau	551.1
Jalan Raya	551 .1
Laut	552.1
Sungai	551.1

Udara	553.1
Laporan pegawai	811
Lambang	001
Bendera Kebangsaan	001.2
Departemen	001.3
Garuda	001.1
Kabupaten/Kota	011.5
LPND	011.6
Partai	215
Provinsi	011 .4
Lampung	Kw-27
Landasan	
Jembatan Kota	531.54
Jembatan Luar Kota	532.54
Landrefrom	592
Pembagian Tanah	592.13
Penentuan Tanah	592.12
Redistribusi	592.1
Sengketa	592.14
Lanjut usia	465.1
Langit-langit elemen bangunan	549.4
Lantai	
Jalan Kota	531.62
Jalan Luar Kota	532.62

Elemen Bangunan	649.4
Lapang olah raga	426.23
Laporan	
Fisik bangunan	942
Kabupaten	130.04
Kecamatan	138.04
Keuangan Bendaharawan	963
Luar Negeri	196
Provinsi	120.04
Latihan Kerja	563
Latihan Militer	321
Lebah	521.234
Legislatif	150
Legitimasi tanda pengenalan pegawai	873.3
Lembaga	
Bantuan Hukum	235
Non Departemen	117
Pendidikan Islam	451.49
Perbankan	584
Sosial Desa	147.12
Swadaya Masyarakat	225
Tinggi Negara	116
Tingkat Desa	144

Lempung tanah bangunan	604.1
Lestari KB	476.2
Lintas batas	185.5
Listrik	671
Distribusi	671.4
Non PLN	671.12
Pembangkitan	671 .2
Pengusahaan	671.2
PLN	671.11
Transmisi	671.3
Logam	544
Mulya	543
Lokakarya	
Lolos butuh	824.5
Lomba desa, Lh : Perlombaan Desa	
Losmen untuk pegawai	845.3
Lurah	141
Administratif	821.28
Lustrum	421

M

Mahkamah Agung	116
Majalah	481.2

Majelis Pennusyawaratan Rakyat	150
Keanggotaan	151
Meninggal	151.32
Pelanggaran	161.4
Pemberhentian	151.3
Pencalonan	151.1
Pengangkatan	151.2
Majelis Ulama	451.7
Makam	469
Keluarga	469
Pahlawan	469.2
Raja	469.3
Umum	469.1
Makanan Ternak	524.6
Makar	351
Malaria	443.41
Maluku	Kw-71
Manasik Haji	451.142
Mandi cuci kakus	645.1
Mandiri	476.3
Margasatwa	522.51
Marmer	
Bahan Bangunan	604.1
Bahan Galian	545

Masa kerja	831
Masyarakat pedesaan	147.33
Mata	441.2
Matrik	341.52
Mazhab	
Budha	455.4
Hindu	454.4
Islam	451.8
Protestan	452.4
Khatolik	4534
Media massa	480
Masyarakat suku terasing	467.1
MCK, Lh : Mandi Cuci Kakus	
Median	
Jalan kota	621.7
Jalan Luar kota	622.7
Jembatan Kota	631.95
Jembatan Luar Kota	632.95
Menara distribusi air minum	694.11
Menara pengabdian irigasi	611.14
Menu makanan rakyat	444.3
Menteri ad interim	113.2
Menwa, Lh : Resimen Mahasiswa	
Mesin kantor	022

Mesjid	
Bangunan	645.8
Sarana Peribadatan	651.2
Mess	013
Metode belajar	423
Meteorologi	557
Meubel perabot rumah dinas	523.53
Minyak bumi	541
Eksploitasi	541.11
Kontrak kerja	541.12
Pengolahan	5541.2
Pengusahaan	541 .1
Minyak tanah	
Pemasaran	511.1
Pengusahaan	541 .1
Minyak goreng	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Tangki	516
Mobilitas	341.42
Modal	570
Asing	572
Patungan	573

Penyertaan	573
Domestik	571
Moneter	589
Monograf	
Monograf Provinsi	120.042
Monumen	
Bangunan	646.1
Penghargaan	022.4
MPR, Lh : Majelis Permusyawaratan Rakyat	150
MTQ	451.15
Muhammadiyah	223.1
Muktamar	217.1
Munas	217.1
Museum	432.1
Mutasi pegawai	820

N

Nahdatul Ulama	223.1
Nasiah Dinas	065.1
Narapidana	186
Narkotika	354
Nelayan	523.5
Night Club	435

NIP. Lh : Nomor Induk Pegawai

Nomor Induk Pegawai	181 .4
Nota Keuangan	901
Nota Pemeriksaan	936
Nusa Tenggara	Kw-6
Barat	Kw-62
Timur	Kw64

O

Obat-obatan	442
Pengadaan	442.1
Penyimpanan	442.2
Untuk Pegawai	843.3
Obligasi	588
Olab raga, Lb : Keolahragaan	426
Olimpiade	426.3
ONH (Ongkos Naik Haji)	451.14
Operasi busana	467.1
Operasi Militer	323
Operation Room	488
Oprit	
Jembatan Kota	631 9

Jembatan Luar Kota	632.9
Orde Baru	203
Orde Lama	202
Orde Reformasi	204
Organisasi	060
Badan Internasional	063
Badan Non Pemerintah	062
Buruh	250
Internasional	252
Intansi Pemerintah	061
Keagamaan	
Budha	45.5.
Hindu	4545
Islam	451 .49
Organisasi	
Gerejani	
Katholik	452.5
Protestan	452.5
Mahasiswa	242
Nelayan	260
Pegawai	874.43
Profesi	238
Remaja	427
Tani	250

Wanita	260
Organda	255
Otonomi Daerah	137
Oto rally, Lh : Auto Rally	426.1
Otorisasi	920
Pembangunan	922
Rutin	921

P

Padat Karya	564.2
Padi	521.21
Padi sawah	521.211
Padi gogo	521.212
Padi huma	521 .213
Pagar	
Jalan Kota	621.97
Jalan Luar Kota	622.97
Jembatan Kota	631.86
Jembatan Luar Kota	632.86
Pagar daerah samping	
Jalan Kota	621.86
Jalan Luar Kota	622.86
Pagar Praja, Lb : Pamong Praja	

Pahlawan	464.1
Pajak	973
Pakalan dinas	025
Paku bahan bangunan	604.33
Palang Merah Indonesia	468
Palawija	521.223
Kacang	52 1.221
Jagung	521.222
Palawija (Lanjutan)	
Ketela umbi	521 .223
Ubi-ubian	521.224
Pameran	
Perdagangan	510.13
Non Komersil	487.1
Lukisan	487.1
Foto	487.1
Pamong Desa / Kepala Desa	141.1
Pemberhentian	141.1
Pemilihan	141.1
Pangkatan	141 .1
PAN (Panitia Anggaran Nasional)	
Tingkat Kabupaten/Kota	134.1
Tingkat Provinsi	124.3
Pancasila	180.11

Panen gagal	521.24
Panitia	
Panggilan	
Pegawai	094
Pelamar	811.3
Panti Asuhan	466.3
Papan bahan bangunan	604.6
Papan bahan instansi	065.3
Parasamnya Puma Karya Nugraha	002.3
Parit	
Jalan kota	621.51
Jalan luar kota	622.52
Pariwisata	566
Partai	
Bukan Peserta Pemilu	212
Peserta Pemilu	211
Pasang surut irigasi	613
Pasar	511.2
Pasar uang/pasar modal	574
Pasca panen	521.71
Pasir bahan bangunan	604.1
Paspor	185.2
Pastur	453.3
Patok KM	

Jalan kota	621.94
Jalan luar kota	622.94
Patok pengaman	
Jalan kota	621 .84
Jalan luar kota	622.84
Patok R.O.W.	
Jalan luar kota	622.95
Jembatan kota	631.95
Jalan kota	621.95
Jembatan luar kota	632.95
Pegawai teladan	861.5
Pejabat Pembuat Akta Tanah	594.4
PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat)	441 .7
Pekan Olah Raga Nasional	426.3
Pekan Raya	510.11
Pekerjaan tanah	
Jalan kota	621.31
Jalan luar kota	622.32
Jembatan kota	631.3
Jembatan luar kota	633.3
Pelabuhan	
Danau	551.43
Feri	551.53
Laut	552.3

Nelayan/Perikanan	523.42
Sungai	551.33
Udara	553.2
Pelajar teladan	421.72
Pelantikan	
Bupati	131
Gubernur	121
Presiden	111
Wakil Presiden	112
Walikota	131
Pelayanan	
Dalam negeri	552.12
Luar negeri	552.13
Pelelangan	510.2
Ikan	523.21
Pelimpahan banjir irigasi	611.13
Pelimpahan samping irigasi	611.38
Pelimpahan pegawai, Lb : Pemindahan	824
Pelimpahan wewenang kepegawaian	875.1
Pemadam kebakaran	364.1
Pemalsuan	355
Ijazah	355.1
Uang	355.2
Pemasaran	511

Pembagian wilayah	
Kabupaten	136
Kotamadya	136
Provinsi	126
Pembangkit listrik	
Tenaga Air	671.21
Tenaga Diesel	671.22
Tenaga Gas	671.23
Tenaga Matahari	671 .24
Tenaga Nuklir	671.25
Tenaga Panas Bumi 6	71.26
Tenaga Uap	671.27
Pembangunan desa	147
Pembebasan dari jabatan	821.2
Pembebasan buta huruf	421.9
Pemberantas hama	521.423
Pemberantasan dan pencegahan penyakit	
Penular langsung (P2ML)	443.4
Pemberantasan penyakit hewan	524.35
Pemberhentian pegawai	880
Alasan Lain	884
Dengan Hak Pensiun	882
Golongan I	882.1
Golongan II	882.2

Golongan III	882.3
Golongan IV	882.4
Karena Meninggal	883
Permintaan Sendiri	881
Tidak Dengan Hormat	888
Untuk Sementara Waktu	887
Pemberontakan	
Pembibitan	
Tanaman Pangan	521.32
Perikanan	531.31
Perternakan	524.52
Pembinaan kesehatan	441
Pembinaan Hansip	341
Pemborong	602
Pembukuan	940
Pembunuhan	352
Bunuh Diri	352.1
Keracunan	352.2
Pemekaran	
Kabupaten/Kota	135
Provinsi	125
Pemeliharaan arsip	045.8
Pementasan kesenian pada acara gelar senja	019.51
Pemeriksaan	821.24

Pemeriksaan administrasi bendaharawan	962
Pemeriksaan kas	961
Hasil	961
Pemerintahan	100
Pemerintah	
Desa	141
Kabupaten/Kota	130
Kecamatan	138
Provinsi	120
Pusat	110
Pemetaan	594.1
Pemilih	275
Pemilihan Umum	270
Pemindahan arsip	045.61
Pemindahan Ibu Kota	
Kabupaten	135
Kota	135
Provinsi	125
Pemindahan pegawai	824
Golongan I	824.1
Golongan II	824.2
Golongan III	824.3
Golongan IV	824.4
Hukuman	824.4

Pemindahan pembukuan	937
Pemotongan hewan	524.7
Pemuda	427
Pemugaran	
Candi	432.21
Lingkungan Desa	147.34
Perumahan Desa	147.34
Pemukiman	
Kembali penduduk	147.32
Suku Terasing	467.1
Tata Kota	653
Pemulihan hak guna bangunan	593.55
Pemungutan suara	277
Pemusnahan arsip	045.63
Pemutusan hubungan kerja	567
Penagihan	956
Penataan berkas	045.5
Penataran	
Kepegawaian	893.3
Penawaran Peralatan Kantor	020.1
Pencalonan	
Anggota	
DPR	151.1
DPR Kabupaten/Kota	171.1

DPRD Provinsi	161.1
MPR	151.1
Bupati/Walikota	131
Gubernur	121
Pamong Desa	141
Pemilihan Umum	270
Presiden	111
Sekda Kabupaten/Kota	133
Sekda Provinsi	123
Wakil Bupati/Walikota	132
Wakil Gubernur	122
Wakil Presiden	112
Pencemaran	
Air	660.31
Lingkungan	658.3
Perkotaan	658.3
Udara	
Lingkungan	660.32
Perkotaan	658.2
Pencurian	
Pendaftaran	
Pendidikan pegawai	897.2
Penduduk	474
Sekolah	422.1

Tanah	594
Pendapatan	970
Pendeta	452.3
Pendidikan	
Khusus	420.1
Luar Sekolah	421.9
Pegawai	890
Luar negeri	894
Non reguler	893
Reguler	892
Pendidikan Agama Islam	451.4
Dasar	451.43
Menengah	452.42
Tinggi	452.41
Pendidikan kedinasan	429
Departemen Dalam Negeri	890
Penelitian	070
Kerjasama	074
Penempatan kembali	826.4
Tugas belajar	826.4
Penerangan	487
Penerangan jalan	656.11
Penerangan lampu pengaman	
Jalan Kota	621.92

Jalan Luar Kota	622.92
Jembatan Kota	631.82
Jembatan Luar Kota	632.82
Penerbitan	481
Penerimaan keuangan	933
Pengadaan	
Pangan	510
Pegawai	810
Peralatan kantor	027
Sadang	502
Pengaduan	
Pengairan	610
Pengamanan pantai	615
Pengambilan batas irigasi	611.24
Pengambilan bebas dengan pompa	611.25
Penganiayaan	353
Pengangguran	560.1
Pengangkatan	
Anggota	
DPR	152.2
DPRD Kabupaten/Kota	162.2
DPRD Provinsi	161.2
MPR	151.2

calon pegawai	813
Golongan I	813.1
Golongan II	813.2
Golongan III	813.3
Golongan IV	813.4
Calon guru Inpres	813.5
Bendaharawan	954
Dalam jabatan	812.2
Pegawai	812
Golongan I	821.1
Golongan II	821.2
Golongan III	821.3
Golongan IV	821.4
Pegawai negeri tetap	821.1
Golongan I	821.11
Golongan II	821.12
Golongan III	821.13
Golongan IV	821.14
Presiden	111
Tenaga	
Asing	815
Bulanan	814.1
Harian	814.2
Lepas	814

Pensiunan	814.3
Wk. Presiden	112
Pengawasan	700
Bidang	
Keamanan	730
Kepegawaian	780
Kesra	740
Ketatalaksanaan	760
Ketertiban	730
Keuangan	790
Pekerjaan Umum	760
Pemerintahan	710
Peralatan	702
Perekonomian	750
Organisasi	706
Politik	720
Pengawasan gunung berapi	546.11
Pengawetan	045.9
Pengembangan	
Desa	147.4
Landreform	529.6
Ternak	524.5
Pengemis	462.2
Pengendalian sungai	614

Pengerukan laut	552.4
Penggajian pegawai	876
Penggantian nama pegawai	874.2
Penghapusan kekayaan negara	953
Penghargaan ijazah pegawai	002
Penghargaan pegawai	833
Bintang	861.1
Hadiah uang	861.4
Kenaikan	
Gaji istimewa	861.3
Pangkat anumerta	861.2
Penghargaan secara adat	002.5
Penghasilan Pamong Praja	142
Penghijauan	
Penghitungan masa kerja	831
Pengobatan tradisional	448
Dukun	448.4
Pijat	448.3
Tusuk jarum	448.1
Pengotoran air dan udara, Lh : Pencemaran	448.2
Penguasaan bangunan	
Jalan kota	621.13
Jalan Luar kota	622.13
Jembatan Kota	631.13

Jembatan Luar Kota	632.13
Penguasaan tanaman	
Jalan Kota	621.12
Jalan Luar Kota	622.12
Jembatan Kota	631.12
Jembatan Luar Kota	632.12
Pengusaha perikanan	523.5
Pengujian kesehatan pegawai	812
Pengukuran tanah	594.1
Pengungsi	465.2
Penilaian pegawai	860
Peninggalan kuno	432.2
Penjagaan pantai	552.2
Penjara	186
Pensiun	
Duda	882.5
Janda	882.5
Pegawai	
Golongan I	448.1
Golongan II	448.2
Golongan III	448.3
Golongan IV	448.4
Uang Muka	882.7
Yatim Piatu	882.6

Penerjemah	481.4
Penundaan kenaikan gaji	862.2
Penunjukan pemborong	602.2
Penurunan pangkat	962.3
Penyakit	
Hewan/Ternak	524.4
Kelamin	441.3
Menular	443.22
Daun	521.411
Batang	521.412
Hutan	522.6
Tanaman	521.41
Pencegahan	443.1
Penyaluran minyak bumi	541
Penyalahgunaan jembatan	356
Penyebaran ternak	524.53
Penyelewengan	356
Penyelundupan	354
Penyerahan arsip	045.62
Penyesuaian gaji pegawai	832
Golongan I	832.1
Golongan II	832.2
Golongan III	832.3
Golongan IV	832.4

Penyesuaian pangkat pegawai	
Golongan I	832.1
Golongan II	832.2
Golongan III	832.3
Golongan IV	832.4
Penyuluhan	
Gotong royong	147.15
Kesehatan masyarakat	441.7
Landrefom	592.5
Lapangan KB	476.4
Ttanaman pangan	521.12
Penyusutan arsip	045.6
PEPABRI	222.1
Perabot kantor	023
Perabot rumah dinas	012.7
Peradilan	183
Agama Islam	451.6
Perkara tanah	593.71
Perak	543
Peralatan	020
Perikanan	523.4
Pertanian	521.31
Besar P.U.	680
Perampasan	

Peraturan	
Daerah	
Kabupaten/Kota	188.341
Provinsi	188.34
Lembaga Non Departemen	188.33
Menteri	188.32
Pemerintahan	188.13
Peraturan Perundang-undangan	188
Perawatan arsip	045.8
Perawatan dokter untuk pegawai	843.2
Perawatan kesehatan	444.6
Pegawai	843.2
Perbaikan kampung perdesaan	147.345
Perbantuan pegawai, Lh : Pemindahan	
Perbendaharaan	950
Perbuatan cabul	357
Perceraian	474.2
Perdagangan	510
Antar Pulau	514
Luar Negeri	515
Perdata	181
Perencanaan	050
Perekonomian	500
Desa	147.2

Pergudangan	516
Perhitungan anggaran	941
Perhitungan suara	277
Perhotelan	556.2
Perhubungan	
Darat	550
Laut	552
Udara	553
Peribadatan	
Budha	455.1
Hindu	454.1
Islam	451.1
Katholik	453.1
Protestan	452.1
Perikanan	523
Perimbangan keuangan	971
Perintis kemerdekaan	
Organisasi	221.1
Pembinaan	464.2
Perizinan	503
Perjalanan dinas	090
Menteri ke Daerah	092
Menteri ke Luar Negeri	097
Pejabat tinggi (eselon I)	093

Pejabat tinggi ke Luar Negeri	098
Pegawai	094
Ke Luar Negeri	099
Presiden ke Daerah	091
Tamu Asing ke Daerah	091
Wakil Presiden ke Daerah	095
Wakil Presiden ke Luar Negeri	096
Perjan	538.1
Perjudian	335
Perkapalan	552.2
Perkawinan	474.2
Perkebunan	525
Perkerasan	
Jalan Kota	621.4
Median	621.73
Trotoar	621.62
Jalan luar kota	622.4
Median	622.73
Trotoar	622.62
Jembatan kota	
Bangunan	631.63
Sprit	631.92
Perkeretaapian	551.6
Perkreditan Desa	147.222

Perkosaan	357
Perladangan	521.52
Perlebahan	521.234
Perlengkapan sekolah	425.3
Perlombaan desa	147.44
Permodalan	570
Perubahan nama	
Benda Geografis	125.1
Daerah	125.1
Gunung	125.1
Kota	125.1
Pulau	125.1
Selat	125.1
Perpetaan	591.2
Perpindahan penduduk	475
Perpustakaan	041
Pers	485
Persatuan	
Guru RI (PGRI)	232.1
Sarjana Hukum Indonesia	233.3
Insinyur Indonesia	233.2
Serikat Islam Indonesia	223.3
Wartawan Indonesia (PWT)	237.1
Persawahan	521.51

Perselisihan perburuhan	565
Persero	538.3
Persidangan	
DPR	156
DPRD Kabupaten/Kota	172
DPRD Provinsi	162
MPR	152
Pertahanan	310
Darat	311
Laut	312
Udara	313
Sipil (Hansip)	340
Pertokoan	511.3
Pertunjukan Hiburan	435
Perum	538
Pertelaan arsip	045.66
Perunggasan	524.4
Perusahaan daerah	539
Perwakilan Asing	191
Perwakilan RI	194
Pesta olah raga	126.3
Pestisida	
Pemberantas Hama	521.43

Sanitasi	133.53
Peta	591.2
Petani	521.6
Perternakan	524
Petugas Pemilu	274
Pidana	182
Pidato Kenegaraan Presiden	111.2
Pijat	448.1
Pilar	
Jembatan kota	531.52
Jembatan luar kota	532.52
Piloon	
Jembatan kota	631.53
Jembatan luar kota	532.53
Pipa	
Transmisi air minum	592.1
Distribusi air minum	594.2
Pintu air	
Air minum	691.5
Polder	612.33
Pintu pengatur banjir	614.12
Pintu elemen bangunan	649.5
Piutang	
Negara	588

Perdata	181.3
Playwood bahan bangunan	604.6
PLKB (Penyuluhan Lapangan KB)	476.4
PMI	468
Pola Klasifikasi	045.3
Polder	612
Poliklinik	445.5
Pegawai	843.1
Polisi pamong praja	331.3
Politik	200
Pompa	
Bensin	541.3
Distribusi air minum	694.3
Instalasi air minum	693.7
Intake air minum	691.8
Unit assaineering	657.23
PON	426.3
Pondasi angkerjembatan kota	631.43
Pondasi angker jembatan Luar kota	632.43
Pondasi	
Elemen Jembatan	649.1
Jembatan Kota	631.4
Jembatan Luar Kota	632.4
Kepala Jembatan	

Jembatan Kota	631.41
Jembatan Luar Kota	632.41
Pilar	
Jembatan Kota	631.42
Jembatan luar kota	632.42
Pondok pesantren	451.44
PORSADE	426.3
Pos	554
Pos Kesehatan hewan	524.32
Posyandu	445.8
PPAT	594.4
Prakualifikasi	602.3
Pramuka	428
Prasekolah	421.1
Prasarana Fisik Pamong Praja	011.1
Prasarana fisik Pemerintah	051
Presiden	111
Amanat	111.2
Prasarana desa	111
Pelantikan	111
Pencalonan	111
Pengangkatan	111
Pertanggungjawaban	111
Pidato Kenegaraan	111

Sumpah	111
Produksi	
Desa	147.21
Pemasaran	147.212
Pengolahan	147.211
Kehutanan	522.2
Perikanan	532.2
Perkebunan	525.2
Peternakan	524.1
Tanaman pangan	521.2
Promosi perdagangan	510.1
Iklan	510.12
Pekan raya	510.11
Protestan	452
Protokol	019
Puasa	451.13
Pullorum	524.33
Pungutan	977
Pupuk	521.33
Pusat	521.33
Pusat kegiatan mahasiswa	425.13
Puskesmas	445.4
Puso	521.24

R

Rabies, Lh : Anjing Gila	443.34
Racun	444.2
RADIO	482
Luar Negeri	482.3
Non RRI	482.2
Republik Indonesia	482.1
Siaran Pedesaan	147.154
RAKER	
Ralat SKO	924
Rambu-rambu	
Jalan Raya	551.11
Laut	552.11
Rambu-rambu bangunan pelengkap	
Jalan kota	621.91
Jalan luar kota	622.91
Jembatan kota	631.81
Jembatanluar kota	632.81
Rapat Komisi DPR	156.3
DPRD Kabupaten/Kota	172.3
DPRD Provinsi	162.3
RAS ayam	524.41
REAL ESTATE	648.3

Reboisasi	522.4
Recall	
Anggota DPR	155.31
Anggota MPR	151.31
Reentry	185.4
Registrasi	
Pegawai	873
Penduduk	474
Rehabilitasi	
Pegawai	866
Penderita cacat	461
Rekreasi	556.4
Rekreasi pegawai	847
Rektor	424
Rel pengaman	
Jalan kota	621.69
Jalan luar kota	622.69
Remaja	427
Repatriasi	465.2
Repelita	050
Reservoir air minum	694.1
Reses	
DPR	156.4
DPRD Kabupaten/Kota	172.1

DPRD Provinsi	172.1
Reshufle Kabinet	113.1
Resimen Mahasiswa	421.73
Restribusi	974
Reuni pelajar	421.73
Riset	071
Riau	Kw-24
Rohaniawan	
Budha	455.3
Hindu	454.3
Islam	451.3
Katholik	453.3
Protestan	452.3
Rosela sewa tanah	593.11
Rotan	522.22
RRI	482.1
RUPTD	050.1
Rujuk	474.2
Rukun kampung	149
Rukun tani	147.162
Rukun tetangga	149
Rukun warga	149
Rumah	
Rumah Dinas	012

Pejabat Dinas	012.1
Dinas Gol. I	012.2
Dinas Gol. II	012.3
Dinas Gol. III	012.4
Bangunan Lainnya	012.5
Tanah Untuk Rumah Dinas	012.6
Perabotan Rumah Dinas	012.7
Pegawai	845
Bangunan Rumah Pejabat Negara	641.2
Perkotaan Bangunan	648.1
Petugas Eksploitasi Polder	612.42
Sehat	147.341
Sengketa	181 .2
Tradisional Bangunan	646.4
Rumah ibadat	
Budha	455.2
Hindu	454.2
Islam	451.2
Katholik	453.2
Protestan	452.2
Rumah Bangunan Sementara	
Jalan Kota	621.27
Jalan Luar Kota	622.27
Jemabatan Kota	631.27

Jembatan Luar Kota	632.27
Rumah Sakit	445
Bangunan	645.3
RSUP	445.1
RS. Jiwa	445.2
RS Mata	445.3
Puskesmas	445.4
Poliklinik	445.5
BKIA	445.6
Rumah Bersalin	445.7
Posyandu	445.8
RS Lainnya	445.9

S

Saham	575
Salah kirim surat	045.2
Saluran Pembawa	
Air minum	691.6
Irigasi	611.3
Induk	611.311
Kwartier	611.315
Pasangan	611.316
Sekunder	611.312

Suplesi	611.313
Tersier	611.314
Tertutup	611.317
Terowongan	611.317
Pasang Surut	611.11
Induk	613.111
Penyimpanan Air	613.114
Sekunder	613.112
Tersier	613.113
Polder	612.212
Induk	612.212
Muka	612.211
Tersier	611.314
Saluran Pembuang	
Irigasi	611.14
Induk	611.411
Sekunder	611.412
Tersier	611.413
Pasang Surut	613.21
Induk	611.411
Kolam Pasang	613.32
Lalu lintas	613.321
Muka	613.322
Pengumpul Air	6 13.322

Sekunder	613.312
Tersier	613.213
Polder	613.32
Induk	613.321
Sekunder	631.322
Saluran pengendali banjir	
Banjir	614.23
Corepure	614.23
Drainage	614.22
Sambutan Menteri Dalam Negeri	114.1
Sambutan Kepala Daerah	121.1
Samijaga, Lh : Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga	
Sampah	658.1
Sandaran Jembatan	
Kota	631.65
Luar Kota	632.65
Sandi	046
SAR	370
Sarana	
Air minum dan jamban keluarga	443.52
Kesenian	431.2
PEMILU	276
Pendidikan	425
Perikanan	523.4

Olah raga	426.2
Usaha Keahlian	522.3
Usaha Pertemakan	524.2
Satelit	555.4
Satya Lencana	002.2
Sawah	521.211
Sawit	525.26
Sayuran	521.23
Screening pegawai	811.2
Sejarah	433
Sekolah	421
Dasar	421.2
Kejuruan	421.5
Menengah	421.3
Pendidikan Luar Biasa	421.8
Pra	421.1
Staf Pimpinan Administrasi	893.1
Tinggi	893.6
Sekretaris	821.22
Daerah Kabupaten/Kota	123
Daerah Provinsi	123
DPRD Kabupaten/Kota	175
DPRD Provinsi	165
Sembilan bahan pokok	511.1

Semen, bangunan	604.5
Sempadan, Lh : Patok R.O.W.	
Seni	
Batik	431.1
Drama	431.1
Lukis	431.1
Musik	431.1
Pahat	431.1
Tari	431.1
Ukir	431.1
Senjata api	333
Dinas	026
Tajam	333
Gadai tanah	
Ganti rugi tanah	592.43
Absentee	592.221
Kelebihan	592.221
Partekelir	592.23
Pengurus hak tanah	593.7
Perdata	
Rumah	181.2
Tanah	181.1
Perjanjian bagi hasil	592.23
Tanah landreform	592.14

Serangga penyebab penyakit	443.44
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	251
Sertifikat tanah	594.3
SESPA, Lh: Sekolah Staf Pimpinan Administrasi	
Sewa tanah	593.1
Rosela	593.11
SIAP	923
SIAPDA	923.1
Siaran pedesaan	147.154
Site ekstrator	611.28
Simposium	992
SKKP/SPP	991
SKO	924
Ralat SKO	924.1
Sosial	920
Sosio drama gotong royong	147.153
Spanduk	004.5
Specimen tanda tangan	
Bendaharawan	955
Kepegawaian	875.2
SPJ, Lh : Surat Pertanggungjawaban	992
Split bahan bangunan	604.1
SPMU	
Pembangunan	932

Rutin	931
SPP	422.4
SSB	555.3
Stabilisasi	
Badan jalan kota	621.32
Badan jalan jalur kota	622.32
Stadion	426.32
Stasiun	
Argo	611.58
Bumi	555.5
Pengukur Air	614.323
Pengukur curah hujan	614.321
Pompa air tanah	616.1
Pompa pemasukan	612.22
Pompa pembuangan	612.31
Statistik	Kp-07
Steenslag bahan bangunan	604.1
Strek dam	
Jemabatan Kota	631.73
Jembatan Luar kota	632.73
Suaka Marga Satwa	522.51
Subak	147.163
Subsidi	972

Subversi	354
Suku Terasing	467.1
Sulawesi	Kw-5
Selatan	Kw-53
Tengah	Kw-52
Tenggara	Kw-54
Utara	Kw-51
Sumatra	Kw-2
Barat	Kw-23
Selatan	Kw-25
Utara	Kw-22
Sumbangan	
Korban Bencana	466.1
Sosial	466
Uang, Lh : Bantuan Uang	
Sumpah	
Bupati	131
Gubernur	121
Pegawai	877
Presiden	111
Wakil Presiden	112
Sumur Air Minum	691.2
Sumur artesis	546.2

Sumur pompa irigasi	611.26
Surat kabar	481.1
Surat pengantar	054.4
Surat pertanggungjawaban	
Anggaran Pembangunan	935
Anggaran Rutin	934
Surat Kaleng	336
Surat Suara	276.3
Surat Tagihan Piutang	956
Survailance	443.33
Survey	072
Susu ternak rakyat	524.11
Susunan Kabinet	113
Susunan Organisasi	061.1
Swadaya Gotong Royong	147.11
Swadaya Masyarakat	341.6
Swapraja	128
Syphon	
Air minum	694.5
Distribusi	692.6
Transmisi	
Irigasi	611.36
Pembawa	611.45
Pembuang	614.18

Pengendalian sungai	
Polder	612.35
Pembawa	612.25
Pembuang	
T	
Tagihan	956
Tahanan	
Kriminal	331
Pemberontakan	351
Tahun Pembelajaran	422.2
Pendidikan Pegawai	879.1
Talang	
Air Jembatan Kota	631.66
Air Jembatan Luar Kota	632.66
Pembawa	611.35
Pembuang	611.44
Taman Mini Indonesia Indah	556.34
Tambak Udang	523.34
Tamu Negara	192
Tanah	
Bonded were house	593.61
Gedung-gedung Negeri	593.33

Industrian estate	593.61
Kantor dagang asing	593.322
Kedutaan	593.322
Kehutanan	593.45
Konsulat	593.332
Kritis	591.5
Longsor	362
Milik Belanda	593.53
Perikanan	593.44
Perkebunan Besar	593.41
Perkebunan Rakyat	593.42
Pertanian Pangan	521.5
Perumnas	593.61
Peternakan	593.43
Real Estate	593.61
Rumah Dinas	012.6
Sengketa Perdata	181.1
Transmigrasi	595
Untuk Pegawai	845.2
Taman Hias	521.233
Tanaman Pangan	521 .1
Bimas	521.11
Kredit	521.11
Tanda daftar rekanan (TDR)	602.32

Tanda Gambar Pemilu	272
Tanda Jabatan	006
Pamong Praja	006.1
Tanda Kehormatan	002
Bintang	002.1
Kepegawaian	861.1
Monumen	002.4
Secara adat	002.5
Satya Lencana	002.2
Kepegawaian	861.1
Tanda lalu lintas, Lh : rambu-rambu	
Tanda Pengenal Pegawai	873
Tanda Pengenal Irigasi	611.53
Tanda Lahir Pegawai	874
Tanggul	
Banjir	614.11
Irigasi	612
Keliling Folder	612.2
Pengamanan Pantai	615.1
Polder	612.11
Tangki	
Bensin	541.3
Minyak Tanah	541.3
TAP MPR	188.1

Tarif Listrik	671.53
Taspen	842.1
Tata Bangunan	601
Tata Desa	147.73
Tata Guna	
Hutan	522.12
Tanah	591
Fatwa	591.4
Tata Kerja	061.1
Tata Kota	650
Tata Laksana	065
Tata Lingkungan	660
Tata Naskah Dinas	065.1
Tata Niaga	510
Tata Tempat	019.3
Tata tertib kantor	061.2
Keamanan Kantor	017
Tata kepegawaian	870
TBC	443.24
Tebu	
Tanaman	525.24
Sewa Tanah	593.11
Tech oil bahan bangunan	604.4
Tegangan Listrik	671.42

Menengah	761.43
Rendah	671.44
Tinggi	525.22
Teh	-
Tekstil	534
Industri	511.1
Pemasaran	555.2
Telegraf	555
Telekomunikasi	555.1
Telepon	483
Televisi	555.3
Telex	524.12
Telur	544.4
Tembaga	525.23
Tembakau	443.51
Tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman	276.1
Tempat pemungutan suara	
Tenaga	672
Air	674
Gas	560
Kerja	569
Asing	564
Sukarela	675
Matahari	446

Medis	673
Minyak	676
Nuklir	677
Panas Bumi	424
Pengajar	451.46
Sekolah Islam	896
Pegawai Negeri	688
Uap	602.1
Tender bangunan	510.3
Tera	
Tenninal	
Danau	654.6
Bangunan	551.22
Sarana Perhubungan Darat	
Bangunan	645.7
Sarana Pembangunan	551.52
Feri	
Bangunan	645.6
Sarana Perhubungan	551.2
Sungai	
Bangunan	645.6
Sarana Bangunan	551.32
Udara	
Bangunan	645.5

Sarana Bangunan	551.32
Ternak, lihat perternakan	524
Tenitis pemetaan	594.12
Tesi Pullorum	524.33
Testing	
Pegawai	811.1
Pendidikan Pegawai	897.2
Sekolah	422.1
Tidak berkewarganegaraan	473
Timah	544.1
Timbunan Tanah	
Jembatan Kota	631.32
Jembatan Luar Kota	632.32
Tokoh adat	
Tokoh agama	
Budha	455.3
Hindu	454.3
Islam	451.3
Katholik	453.3
Protestan	452.3
Tokoh Masyarakat	189.1
Transfer Uang	586
Transmigrasi	475.1
Tanah Untuk	595

Transmisi	
Air Beku	692
Listrik	671.3
Transportasi	656
Travel Service	566.3
Trotoir Jalan Luar Kota	622.6
Trotoir Jalan Dalam Kota	621.6
Trianggulasi	594.13
TPS	276.1
Tugas belajar	826
Di Dalam Negeri	826.1
Di Luar Negeri	826.2
Tuli/Bisu	461.4
Tumpang Sari	522.4
Tuna Susila	462.3
Tuna Sosial	462
Tuna Wisma	462.5
Tuna Runggu/Cacat Telinga/Tuli	461.3
Tuna Netra/Cacat Mata	461.1
Tungro	521.421
Tunjangan	841
Belajar	826
Pendidikan Pegawai	898.1
Hari Raya	841.4

Jabatan	841.1
Kehormatan	841.2
Keluarga	841.6
Kematian	841.3
Pangan	841.7
Perjalanan	
Cuti	841.5
Dinas Tetap	841.4
Pindah	841.5
Tuntutan Ganti Rugi	951
Tuntutan Perbendaharaan	
Turap Penahan	
Jalan Kota	621.98
Jalan Luar Kota	622.98
Jembatan Kota	631.71
Jembatan Luar Kota	632.7

U

Uang	
Buku	898.5
Makan Pegawai	841.7
Pendidikan Pegawai	898.3
Muka Pensiun	882.7
Palsu	355.1

Pesangon Pegawai	885
Sekolah	422.4
Transport Pendidikan Pegawai	898.4
Tunggu	886
Ubi-ubian	521.224
Ucapan	004
Terima Kasih	004.1
Selamat	004.2
Bela Sungkawa	004.3
Lainnya	004.4
UDKP, Lh : Unit Daerah Kerja Pembangunan	491.5
Ujian	
Dinas	864
Metode Belajar	423.7
Pendidikan Pegawai	897.2
Untuk Sekotah	422.1
UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	491.5
Ulama Islam	451.3
Umbul-umbul	019.6
Umroh	451.141
Undang-undang	188.2
Dasar	180.12
Gangguan	530.08

Undangan	005
Undian	466.2
Unggul	
Bibit Unggul	524.42
Unit Daerah Kerja Pembangunan Desa	147.42
Upacara	
Bendera	019.1
Upah Buruh	561
Urusan Dalam	010
Urbanisasi	475.2
Urusan Haji	451.14
Urusan Negara	538
Usaha Kesehatan Sekolah	441..5
Utang Perdata	181.3

V

Vaksinasi	443.1
Verifikasi	930
Veteran	
Cacat	464.3
Organisasi	221.3
Visa	185.1
Vulkanologi	546.1

W

Waduk	611.1
Lapangan	611.55
Wajib Militer	322
Kepegawaian	322
Wakaf	827
Wakil Bupati/Walikota	
Cuti	132
Pelantikan	132
Pemberhentian	132
Pencalonan	132
Pengangkatan	132
Serah Terima	132
Wakil Gubernur	
Cuti	125
Pelantikan	122
Pemberhentian	122
Pencalonan	122
Pengangkatan	122
Serah Terima	122
Wakil Presiden	
Pelantikan	112
Pencalonan	112
Pengangkatan	112

Sumpah	112
Walang Sangit	521.421
Warga Negara	
Asli	471.1
Asing	472
Keturunan Asing	472.2
Warning System Banjir	614.31
Wawancara	485.11
Wereng	521.441
Wesel	586
Widya Wisata	423.4
Pendidikan Pegawai	895.4
Wredatama	222.2

Y

Yayasan Dana Landreform	592.7
-------------------------	-------

Z

Zakat	451.12
-------	--------

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH
Penata / IIIc
NIP. 197501082003121003

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA